



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 64 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Dinas Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Dinas Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN 2022 NOMOR 64

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA
DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode 1 tahun ke depan, yang ditujukan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan yang baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Oleh karena itu Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2024 yang bersifat perencanaan indikatif. Sedangkan Perubahan RENSTRA Dinas Perikanan dan Peternakan dalam penyusunannya berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut dengan memperhatikan RPJP daerah dan RPJM Nasional, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat daerah, Lintas program antar Satuan Kerja Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kealutan ini merupakan implementasi kebijakan pembangunan daerah dalam bidang peternakan dan perikanan.

Penyusunan renja perangkat daerah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023 dimulai dari pengumpulan Data dan analisis permasalahan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan RKPD kabupaten Garut, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, masalah yang dihadapi serta usulan program

serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023. Rancangan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada renja perangkat daerah terkait.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 merupakan kesinambungan dari tema pembangunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023, yaitu *“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah Serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”*, dengan fokus pembangunan perikanan dan peternakan pada i) peningkatan pelayanan publik; ii) pemerataan pembangunan dan daya saing daerahserta iii) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, pemulihan industri, perdagangan, pariwisata, investasi, serta penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integritas dan profesionalisme.

Sasaran pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan yaitu Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan dan peternakan merupakan penjabaran dari Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 yaitu Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya.

Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, maka rancangan renja perangkat dapat ditetapkan oleh kepala perangkat daerah setelah mendapat pengesahan dari Bupati.

1.1.1. Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Garut terletak di sebelah Selatan dari ibukota Propinsi Jawa Barat, secara administratif berbatasan di sebelah Utara dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, sebelah Timur dengan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia dan sebelah Barat dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Luas wilayahnya sekitar 3.065,19 Km². Wilayah tersebut terbagi atas 42 Kecamatan, 21 Kelurahan dan 403 Desa. Secara geografis terletak diantara 6° 56' 49" – 7° 45' 00" Lintang Selatan dan 107° 25' 8" - 108° 7' 30" Bujur Timur. Kabupaten Garut, dalam perkembangannya mengalami perubahan yang cukup signifikan, hal ini banyak dipengaruhi oleh letak geografis yang cukup strategis karena berbatasan dengan ibukota Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan geografis Kabupaten Garut dibagi ke dalam 3 (tiga) wilayah yaitu Wilayah Utara, Wilayah Tengah dan Wilayah Selatan. Kebijakan pembagian wilayah ini dimaksudkan agar terjadinya spesialisasi wilayah sesuai dengan potensinya masing-masing.

a. Gambaran Umum Sektor Perikanan di Kabupaten Garut

Kabupaten Garut memiliki potensi perikanan budidaya air tawar seluas 26.000 Ha yang mencakup perikanan budidaya kolam air tenang, kolam air deras dan mina padi. Potensi Perikanan budidaya juga mencakup budidaya tambak seluas 1000 ha dan potensi perairan umum seperti Danau/rawa seluas 258 ha, serta sungai sepanjang 1.290,29 Km.

Perikanan budidaya di Kabupaten Garut sangat potensial untuk dikembangkan karena didukung oleh kondisi topografi wilayah yang memiliki ketersediaan air cukup besar. Saat ini pemanfaatan lahan budidaya air tawar baru mencapai sekitar 11.500 ha atau sekitar 54,8% dari potensi yang ada.

Produksi konsumsi ikan segar di Kabupaten Garut pada Tahun 2021 sebesar 66.111 ton yang berasal dari perikanan budidaya Kolam mencapai 38.348 ton, Mina Padi sebesar 26.483 ton dan budidaya tambak sebesar 920 ton. Komoditas ikan konsumsi didominasi Ikan Mas dan Ikan nila sebanyak lebih dari 80% dan sisanya berasal dari produksi lele, gurame dan udang. Selain ikan konsumsi, Kabupaten

Garut juga menghasilkan produksi ikan non-konsumsi yang terutama didominasi oleh ikan hias.

Pengembangan bisnis di bidang perikanan di Kabupaten Garut masih sangat terbuka luas mengingat besarnya permintaan produk perikanan terutama ikan konsumsi dan ikan hias yang terus meningkat setiap tahun.

Pesisir dan lautan Kabupaten Garut terletak di wilayah selatan menghadap Samudera Indonesia. Wilayah barat berbatasan dengan pesisir Kabupaten Cianjur, wilayah selatan berbatasan dengan pesisir Kabupaten Tasikmalaya sementara ke wilayah Selatan berbatasan dengan perairan Australia.

Panjang pantai Kabupaten Garut terbentang kurang lebih 83 km meliputi 7 (tujuh) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Caringin, Bungbulang, Mekarmukti, Pakenjeng, Cikelet, Pameungpeuk dan Cibalong.

Pesisir Kabupaten Garut memiliki ragam ekosistem yang cukup lengkap antara lain:

- Estuaria : 24 ha
- Terumbu Karang : 525 ha
- Padang Lamun : 75 ha
- Mangrove : 50,9 ha

Wilayah laut Kabupaten Garut sangat kaya dengan ikan. Jenis ikan yang umum ditangkap antara lain Ikan Tuna, Cakalang, Tongkol, Cumi-cumi, Layur, Kakap, Bawal, Kerapu, Baronang, Cucut Botol, Lobster dan Ikan Hias.

Potensi sumberdaya perikanan di Kabupaten Garut untuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif, 200 mil laut dari garis pantai) memiliki luas area penangkapan sekitar 28,560 km² dan diestimasi memiliki potensi lestari (MSY) ikan sekitar 166.667 ton pertahun. Sementara untuk zona teritorial (12 mil laut dari garis pantai) memiliki potensi ikan sebesar 10.000 ton/tahun.

Potensi tersebut masih belum termanfaatkan secara optimal karena keterbatasan armada penangkapan dimana umumnya armada tangkap memiliki kapasitas dibawah 10 GT sehingga ikan yang bisa dihasilkan hanya sekitar 49,9% dari total potensi yang ada.

Panjang pantai pesisir selatan Garut yang mencapai \pm 80 Km memungkinkan dikembangkannya beragam kegiatan budidaya. Budidaya laut: Potensi yang ada sebesar 3.400 Ha dan baru dimanfaatkan sebesar 0.5 Ha atau baru sekitar 0.01%. Budidaya tambak: Potensi yang ada sebesar 1000 Ha dan baru dimanfaatkan sekitar 26.6 Ha atau baru termanfaatkan sekitar 2,66%

Jenis usaha budidaya yang bisa dikembangkan antara lain budidaya tambak udang, budidaya tambak bandeng, budidaya lobster, budidaya kerapu, budidaya kepiting bakau, budidaya ikan hias dan sebagainya.

b. Gambaran Umum Sektor Peternakan di Kabupaten Garut

Kabupaten Garut memiliki komoditas unggulan berupa Domba Garut yang dikenal sampai keluar daerah dan memiliki potensi pasar yang terbuka luas baik untuk produksi daging maupun hobi. Selain Domba, potensi pengembangan Sapi Perah juga cukup besar dan menjadi pemasok susu kedua terbesar. Kabupaten Garut dengan wilayah yang luas dan topografi yang menunjang untuk budidaya ternak merupakan salah satu sumberdaya yang bisa dimanfaatkan.

Berdasarkan data Tahun 2021, populasi ternak yang ada di Kabupaten Garut terdiri dari:

- Sapi Perah sebanyak 14.298 ekor,
- Sapi Potong 30.228 ekor,
- Kerbau 6.217 ekor
- Domba 998.721 ekor,
- Kambing 59.191 ekor,
- Ayam Buras 1.540.842 ekor
- Ayam Ras Pedaging 1.142.320 ekor,
- Ayam Ras Petelur 341.736 ekor Itik 62.110 ekor.

Dengan banyaknya populasi ternak di Kabupaten Garut mapu mendorong peningkatan produksi hasil ternak. Produksi hasil peternakan di Kabupaten Garut pada Tahun 2021 meliputi:

- Produksi daging sapi 1.892,73 Ton

- Produksi daging domba 1.840,53 ton
- Produksi daging ayam 2.777,30 ton
- Produksi susu 27.868,100 liter
- Produksi telur 7.827,92 ton

Selain produksi daging, telur dan susu, produksi hasil peternakan unggulan di Kabupaten Garut diantaranya adalah produksi kulit. Kulit banyak digunakan sebagai bahan dasar bagi beragam produk kerajinan seperti jaket, sepatu, tas dan sebagainya.

Potensi pasar untuk komoditi daging, telur dan susu maupun produk sampingan lainnya, masih sangat terbuka luas. Peluang ekspor nasional komoditas peternakan masih terbuka luas terutama untuk Arab Saudi yang masih membutuhkan pasokan ternak sekitar 2,5 juta ekor pertahun. Permintaan ternak hidup untuk wilayah Jawa Barat sebagian masih mengandalkan pasokan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga peluang pasar di Jawa Barat sendiri masih sangat terbuka. Peluang penjualan ternak terutama untuk hari raya Idul Qurban untuk pasokan wilayah Bandung dan Jakarta masih sangat terbuka luas.

Selain memproduksi daging, telur dan susu, usaha peternakan memiliki potensi pengembangan yang cukup besar dengan diversifikasi usaha yang variatif meliputi:

- Pabrik Pengolahan Pakan;
- Pengembangan kebun HMT
- Pengembangan Bank Pakan
- Pengembangan Pupuk Organik hasil limbah
- Pengembangan instalasi biogas skala bisnis;
- Usaha pengolahan produk hasil ternak (daging, susu, telur, kulit);
- Pengembangan Wisata Agribisnis Peternakan;
- Usaha Penunjang (obat-obatan, alat pertanian)

Penyusunan Rencana kerja Dinas Perikanan dan Peternakan tidak terlepas dari kebijakan yang diterapkan oleh kementerian

maupun rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

1.1.2.Keterkaitan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut dengan Renja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan Arah kebijakan KKP disusun untuk mencapai misi pembangunan kelautan dan perikanan. Beberapa Kebijakan yang sinergis dengan kebijakan di Kabupaten Garut antara lain

- 1) Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu;
- 2) Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan;
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan; dan
- 4) Penguatan sarana sistem pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 5) Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan;
- 6) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan;
- 7) Penyempurnaan tata kelola perikanan;
- 8) Pengelolaan perikanan berkelanjutan.
- 9) Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi;
- 10) Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi;
- 11) Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir;
- 12) Penyediaan data dan informasi sumberdaya kelautan yang terintegrasi (one map policy) dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
- 13) Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut;

- 14) Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari; dan
- 15) Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

1.1.3.Keterkaitan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut dengan Renja Kementerian Pertanian

Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan yaitu Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan selaras dengan tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berbasis sumber daya lokal yaitu dalam rangka :

- 1) meningkatkan produksi ternak,
- 2) Meningkatkan kualitas komoditas ternak,
- 3) Meningkatkan produk ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor,
- 4) meningkatkan status kesehatan hewan,
- 5) Meningkatkan investasi peternakan, dan
- 6) meningkatkan kesejahteraan peternak

1.1.4.Keterkaitan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut dengan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat

Rumusan strategi pembangunan kelautan dan perikanan dalam Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sejalan dengan Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan yaitu meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan.

Sasaran dan strategi DKPP Provinsi Jawa Barat adalah :

Sasaran 1: Meningkatnya Produksi Serta Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan.

Strategi:

- 1) Peningkatan produksi perikanan tangkap wilayah utara dan selatan Provinsi Jawa Barat yang didukung oleh inovasi

teknologi, informasi, dan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap yang kondusif.

- 2) Peningkatan produksi perikanan budidaya Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan benih dan induk unggul yang didukung dengan penerapan teknologi budidaya, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif.
- 3) Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan hasil ikan yang didukung oleh inovasi teknologi dan informasi sehingga dapat meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemasaran produk yang modern untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional.
- 4) Peningkatan konsumsi ikan Provinsi Jawa Barat yang didukung oleh teknologi dengan membentuk brand, trend, dan kebudayaan sehingga terbentuk kebiasaan dan kebanggaan masyarakat mengkonsumsi produk perikanan.
- 5) Kerjasama dan kolaborasi antar pihak baik pemerintah, lembaga Pendidikan, kelompok nelayan, kelompok budidaya perikanan dan pihak swasta di bidang produksi, pengolahan, dan pemasaran produk perikanan.
- 6) Pengembangan Korporasi, pengembangan ini dimaksudkan terjadinya sinergisme antara pengusaha perikanan dan kelautan secara terintegrasi dengan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Dimana korporasi mampu secara terus menerus dapat mendapatkan produk yang berkualitas dengan memberikan harga yang layak dan berkeadilan.

Sasaran 2: Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.

Strategi:

- 1) Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut yang mengedepankan prinsip kelestarian yang bertanggungjawab melalui riset dan inovasi teknologi.

- 2) Peningkatan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan pesisir dan laut melalui kepatuhan terhadap aturan dan perizinan.
- 4) Peningkatan pengetahuan masyarakat nelayan dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan.
- 5) Peningkatan inovasi teknologi informasi di bidang kelautan dalam menjaga dan mengawasi perairan laut wilayah Jawa Barat untuk mencegah dan mengurangi terjadinya IUU fishing.

1.1.5.Keterkaitan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut dengan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2023 adalah Meningkatkan produksi peternakan dengan startegi :

- 1) Peningkatan populasi dan produksi komoditi ternak
- 2) Peningkatan Status Kesehatan Hewan dan Peningkatan Status Produk Hewan yang ASUH
- 3) Meningkatnya penyidikan dan pengujian penyakit hewan dan produk hewan
- 4) Meningkatnya jumlah pelayanan kesehatanhewan
- 5) Peningkatan Kualitas Pakan dan Bahan Pakan Ternak
- 6) Peningkatan produksi susu dan HPT
- 7) Peningkatan produksi dan produktivitas ternak dan hasil ternak
- 8) Peningkatan produksi dan produktivitas ternak dan hasil ternak domba dan kambing
- 9) Peningkatan produksi dan produktivitas ternak dan hasil ternak unggas
- 10) Peningkatan kualitas bibit ternak sapi potong

1.1.7. Tantangan yang Dihadapi

Sebagai salah satu dinas teknis yang memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Garut, Dinas Perikanan dan Peternakan harus siap menghadapi tantangan yang cukup berat di masa depan. Era globalisasi dan otonomi daerah merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus diantisipasi sejak dini dalam rangka meningkatkan upaya mensejahterakan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang perikanan dan peternakan selama ini antara lain:

- Wilayah dan komoditi perikanan dan peternakan yang diusahakan masyarakat pada umumnya belum mengutamakan pada skala usaha ekonomis sehingga perlu dibentuk kawasan terpadu berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran.
- Profesionalisme, pengetahuan dan keterampilan peternak, pembudidaya ikan, nelayan serta petugas, baik dalam proses produksi maupun pasca produksi, serta kemampuan manajemen usaha pemasarannya belum optimal.
- Kabupaten Garut memiliki potensi lahan perikanan dan peternakan yang cukup luas untuk dikembangkan sehingga perlu lebih dioptimalkan dengan sistem pengelolaan yang intensif dan terpadu.
- Keterbatasan akses permodalan menyebabkan kebutuhan permodalan ditingkat kelompok usaha masih sulit terpenuhi, sehingga perlu ada upaya sinergis dalam meningkatkan permodalan melalui kerjasama dengan instansi dan lembaga keuangan terkait.
- Jumlah dan kualitas petugas teknis di lapangan masih kurang seimbang dibandingkan dengan luasnya jangkauan wilayah kerja serta masih kurang didukung oleh ketersediaan sarana transportasi dan fasilitas kerja yang memadai.
- Semakin menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan bagi pengembangan pembangunan di sektor perikanan dan peternakan perlu diantisipasi melalui aktifitas pelestarian lingkungan dan pengembangan tata kelola lahan secara lestari

- Perlunya penataan kelembagaan petani/peternak, pembudidaya ikan dan nelayan sebagai wadah belajar bersama dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sistem dan mekanisme pasar serta rantai tata niaga pemasaran.
- Proses pelaksanaan alih teknologi dari hasil – hasil penelitian menjadi teknologi terapan yang praktis, masih sering terkendala oleh terbatasnya jumlah dan kualitas petugas dilapangan sehingga perlu dicari solusi yang efektif.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut disusun berdasarkan acuan pada ketentuan per undang – undangan yang berlaku sebagai dasar hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 Tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
 22. Peraturan Menteri Pertanian No.74/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan;
 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/ Permetan/OT.140/5/ 2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan;
 24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
 26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
 27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;

28. Peraturan Menteri Pertanian No. 100/. Permentan/OT.140/7/2014, tentang Pedoman Pembibitan Sapi. Perah Yang Baik;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban;
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/PK.130/4/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015 tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong Yang Baik;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.440/8/2015 tentang Pemasukan Sapi Bakalan dan Sapi Indukan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
34. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat;

38. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tentang penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/PK.020/2/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Penetapan Kabupaten Garut sebagai Wilayah Sumber Bibit Domba Garut;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
49. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
50. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

51. Peraturan Bupati Garut Nomor 166 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024;
52. Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
53. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Mengingat tantangan yang semakin besar di masa depan tersebut, maka perlu ada upaya perencanaan secara sistematis dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara lebih efisien dan efektif sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai. Oleh karenanya perlu ada dokumen Rencana Kinerja Tahunan (dalam rangka implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari penyusunan RENJA ini adalah:

1. Menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terinci;
2. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
3. Dapat menjadi suatu *performance agreement*;
4. Memudahkan proses pengukuran kinerja;
5. Membantu monitoring dan evaluasi kinerja;
6. Membantu menetapkan kinerja periode berikutnya

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2022, disusun berdasarkan tahapan - tahapan dan prosedur yang ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah. Pada tahap awal penyusunan adalah dengan memformulasikan rencana kerja, dengan memperhatikan Perubahan RENSTRA Dinas Perikanan dan Peternakan TA. 2019-2024 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan usulan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Selanjutnya dikaji agar dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi, mempunyai arah fokus strategi yang jelas, serta mampu mengeksploitasi kesempatan dan tantangan organisasi di masa akan datang.

Dokumen Rencana Kerja diharapkan mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi di lingkungan organisasi Dinas peternakan, Perikanan, dan Kelautan serta memiliki orientasi terhadap masa depan. Selain itu dituntut pula dapat menumbuhkan kesinambungan organisasi.

Renja ditetapkan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasarannya, yaitu berupa kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terinci setiap tahun. Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

1. Bab. I : Pendahuluan; yang memuat latar belakang berisi gambaran umum kondisi daerah dan analisis situasi kinerja organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, landasan hukum, maksud dan tujuan yang berisi tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan RENJA, serta sistematika penulisan.
2. BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu; yang berisi Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja pelayanan yang telah dicapai berdasarkan identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD, Isu-isu strategis dimana penetapan isu-isu strategis dibuat dengan mempertimbangkan seluruh faktor lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang dihadapi, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

3. BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; merupakan konsensus dan komitmen dari seluruh jajaran aparatur dan masyarakat Peternakan dan Perikanan dalam rangka mendukung visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Garut periode 2019 – 2024 yaitu "*Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera*" serta visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025 yaitu "*Mewujudkan Kabupaten Garut Yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan Lingkungan*". Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaian; berisi penetapan tujuan, arah kebijakan dan strategi, sasaran serta cara pencapaian yang merupakan konsensus dan komitmen dari seluruh jajaran aparatur dan masyarakat perikanan dan peternakan, dalam upaya terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024.
4. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan; berisi uraian tentang rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta pagu indikatif yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang.
5. Bab V : Penutup. Merupakan ringkasan atau kesimpulan dari seluruh dokumen yang disusun.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2021, Dinas Perikanan dan Peternakan melaksanakan program kegiatan sebanyak 8 program dan 37 sub kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 20,725,623,873. Realisasi Keuangan Belanja Langsung sebesar Rp. 19.196.831.499 tercapai sebesar 92.62 % sedangkan untuk Realisasi Fisik Pekerjaan sebesar 100 %.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 ada 1 (satu) sub kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90 % yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian keuangan sebesar 82,98 %, hal ini disebabkan salah satu paket pekerjaan pengadaan barang jasa konstruksi Rehabilitasi Kolam/Bak Penampung (DAK) berdasarkan hasil jasa konsultasi perencanaan dan kebutuhan secara teknis Harga Penilaian Sendiri (HPS) Rp.199.800.000- lebih rendah dari pagu anggaran senilai Rp.376.800.000- sehingga sisa pagu anggaran yang tidak terserap senilai Rp. 177.000.000- atau sebesar 53%.

Implikasi yang timbul dari tidak terserapnya anggaran tersebut menyebabkan capaian realisasi keuangan pada Dinas Perikanan dan Peternakan tidak mencapai harapan.

Upaya pemecahan masalah agar capaian target renstra tercapai adalah melakukan penyesuaian pada paket pekerjaan pengadaan barang jasa konstruksi Rehabilitasi Kolam/Bak Penampung (DAK) dilaksanakan sesuai dengan tingkat kebutuhan teknis dan hasil Harga Perhitungan Sendiri (HPS) jasa konsultasi perencanaan sehingga realisasi fisik tetap tercapai.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pekerjaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 -2024		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024						
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan (renja perangkat daerah) Tahun 2021	Realisasi i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
3	2	1													
3	2	1													
3	2	1	2												
3	25	1	2	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan	15	Dokumen	3	3	3	100	3	3	20
3	25	1	2	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Koordinasi dan Pelaporan capaian kinerja SKPD	60	Laporan	12	12	12	100	12	12	20

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

					Kinerja SKPD												
3	25	1	2	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bimtek aplikasi sistem Evaluasi dan pelaporan Evaluasi	3	Laporan	3	3	3	100	3	3	100		
3	2	1	2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	Bulan	12	12	12	100	12	12	20		
3	25	1	2	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	60	Bulan	12	12	12	100	12	12	20		
3	25	1	2	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuanganan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Laporan Keuangan dan Semesteran	70	Laporan	14	14	14	100	14	14	20		
3	2	1	2.1		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	Bulan	12	12	12	100	12	12	20		
3	25	1	2.1	2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	10	Paket	2	2	2	100	2	2	20		
3	25	1	2.1	5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	25	Jenis	5	5	5	100	5	5	20		
3	25	1	2.1	6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	Bulan	12	12	12	100	12	12	20		
3	25	1	2.1	8	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat dinastersediaan kebutuhan snack rapat dinas dan kebutuhan makan minum tamu	60	Bulan	12	12	12	100	12	12	20		

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	25	1	2.1	9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunanterlaksananya a koordinasi dan pembinaan petugas lapangan dan UPTD	60	Bulan	12	12	12	100	12	12	20
							42	kecamatan	42	42	42	100	42	42	100
							13	UPT	13	13	13	100	13	13	100
3	25	1	2.1		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	Bulan	12	12	12	100	12	12	20
3	25	1	2.1	01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas	1	Unit	1	1	1	100	1	1	100
3	25	1	2.1	09	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehabilitasi gedung sederhana	1	Unit	1	1	1	100	1	1	100
						Pembangunan Sumur Bor dan sarana penunjang air bersih	1	Unit	1	1	1	100	1	1	100
						Pembangunan Benteng pamidangan rancabango	1	Unit	1	1	1	100	1	1	100
						Pembangunan gudang penyimpanan mesin	1	Unit	1	1	1	100	1	1	100
3	25	1	2.1		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pelayanan kantor	12	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
3	25	1	2.1	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telepon air dan listrik	12	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
3	25	1	2.1	4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa keamanan jasa kebersihantersedianya alat dan bahan kebersihan	12	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
3	25	1	2.1		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananay Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	12	12	12	100	12	12	100

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	25	1	2.1	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin Kendaraan Pajak Kendaraan dinas /operasional	7	Unit	7	7	7	100	7	7	100
							63	Unit	63	63	63	100	63	63	100
3	25	1	2.1	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan sarana operasional UPT	5	UPT	5	5	5	100	5	5	100
3	2	3			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	1	%	1	1	1	100	1	40.7	4070
3	2	3	2		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan produksi Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7	Lokasi	7	7	7	100	7	7	100
3	25	3	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatnya sarana usaha perikanan tangkap (perahu mesin motor tempel dan jaring)	2	Kelompok	2	2	2	100	2	2	100
3	25	3	2	2	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Usaha Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan produksi perikanan melalui-Restocking ikan di perairan umum (situ/danau) - Penerapan inovasi Center Point Breeding di Situ Bagendit - Penyusunan kajian penataan kawasan perikanan tangkap Situ Bagendit 	5	Lokasi	5	5	5	100	5		0
							1	unit	1	1	1	100	1		0
							1	Paket	1	1	1	100	1		0

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	25	3	2		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan nelayan kecil dalam mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah hasil perikanan tangkap	10	Lokasi (Kecamatan pantai dan kecamatan lokasi PUD)	10	10	10	100	10	10	100
3	25	3	2	1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	- Terlaksananya bantuan alat tangkap untuk nelayan kecil (perahu mesin motor tempel dan jaring) - Terlaksananya penerapan inovasi rumpon ramah lingkungan - Terlaksananya pembersihan lahan perairan dari bun bun dan gulma	5	Kelompok	5	5	5	100	5	5	100
							50	Unit	50	50	50	100	50	50	100
							2	Ha	2	2	2	100	2	2	100
3	25	3	2	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Usaha Untuk Wanita Nelayan dan Masyarakat Pesisir/terdampak Covid 19	200	orang	200	200	200	100	200	200	100
3	25	4			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan Budidaya	1	%	1	1	1	100	1	7:08	29.72222
3	25	4	2		Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	5	kelompok	5	5	5	100	5	5	100
3	25	4	2	1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Budidaya Ikan Pada Saluran Irigasi Pembudidaya Ikan	5	kelompok	5	5	5	100	5	5	100
3	25	4	2		Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana perikanan	9	Unit	9	9	9	100	9	9	100

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

					Budidaya										
3	25	4	2	02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Terlaksananya Pembangunan Saung Meeting	1	Unit	1	1	1	100	1	1	100
					- Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan	1,588	kg	1,588	1,588	1,588	100	1,588	1,588	100	
					- Terlaksananya Pengadaan Calon Induk Unggul	1	paket	1	1	1	100	1	1	100	
					- Terlaksananya Pengadaan Pakan Ikan	170	m2	170	170	170	100	170	170	100	
					- Terlaksananya Pengadaan Sarana Budidaya ikan hias tawar	2	paket	2	2	2	100	2	2	100	
					- Rehab Bangunan Panti/Bangsai Hatchery	1	paket	1	1	1	100	1	1	100	
					- Tersedianya alat Pengukuran/Pemeriksaan Kesehatan Ikan/Mutu Benih	1	paket	1	1	1	100	1	1	100	
					- Terlaksananya Rehabilitasi Kolam/Bak Pemijahan	1	paket	1	1	1	100	1	1	100	
					- Rehabilitasi Air Pasok(masuk) dan Buang (Keluar)Air	1	paket	1	1	1	100	1	1	100	
3	25	4	2	04	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Gelar Acara Kontes Koi	1	kali	1	1	1	100	1	1	100
3	25	5			Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	7	Kecamatan pantai	7	7	7	100	7	7	100

3	25	5	2		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawadan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	7	Kecamatan pantai	7	7	7	100	7	7	100
3	25	5	2	1	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawadan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (POKMASWAS) serta dan bantuan sarana patroli	5	Kelompok	5	5	5	100	5	5	100
3	25	6			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan	721	Ton	721	721	721	100	721	869.3	120.5687
3	25	6	2		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	15	Kelompok	15	15	15	100	15	15	100
3	25	6	2	1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	- Terselenggaranya Acara Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) - Terlaksananya Pembinaan Kelompok Wanita Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	1	Kali	1	1	1	100	1	1	100
							15	Kelompok	15	15	15	100	15	15	100
3	25	6	2		Kegiatan Penyediaan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan unit sarana pemasaran	2	Unit	2	2	2	100	2	2	100
3	25	6	2	01	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk	- Terlaksananya Pekerjaan biofil +pemasangan	2	M ³	2	2	2	100	2	2	100

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

					Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Terlaksananya Pembuatan Awning (pasar Ikan)	154	M ²	154	154	154	100	154	154	100
3	25	6	2	02	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil	1	Paket	1	1	1	100	1	1	100
3	2	2			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Ternak	1	%	1	1	1	100	1	5.06	506
3	2	2	2		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) ewanTumbuhanMikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	1	Tahun	1	1	1	100	1	1	100
3	27	2	2	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	- Terlaksananya Penyediaan Sarana Inseminasi buatan - Terlaksananya Pengadaan Domba Kelas c jantan - Terlaksananya Pengadaan Domba Kelas C betina - Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Seni ketangkasan domba - Terlaksananya Pengadaan Bibit Ternak Unggassarana prasarana (Pengembangan Ternak Ayam KUB)	2 5 31 1 1	Paket Ekor Ekor Set Paket	2 5 31 1 1	2 5 31 1 1	2 5 31 1 1	100 100 100 100 100	2 5 31 1 1	2 5 31 1 1	100 100 100 100 100
3	27	2	2	03	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	- Terlaksananya Kontes Ternak Tingkat Kabupaten Garut	1	Kali	1	1	1	100	1	1	100

						- Terlaksananya Pembuatan vidio Promosi komoditas Peternakan	1	Paket	1	1	1	100	1	1	100
3	2	2	2.1		Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	374	Ekor	374	374	374	100	374	374	100
3	27	2	2.1	1	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	- Pengadaan Sapi Potong Ongole Betina	24	Ekor	24	24	24	100	24	24	100
						- Pengadaan Sapi Potong Ras Peranakan Ongole jantan	12	Ekor	12	12	12	100	12	12	100
						- Pengadaan Sapi Potong Ras Silangan /Cross Breed Betina Fase Muda	18	Ekor	18	18	18	100	18	18	100
						- Pembangunan kandang Sapi	11	m ²	11	11	11	100	11	11	100
						- Pembangunan kandang ayam Petelur	3	unit	3	3	3	100	3	3	100
						- Pengadaan Ternak Domba Garut	240	ekor	240	240	240	100	240	240	100
						- Pengadaan ternak Domba Ras Priangan	68	ekor	68	68	68	100	68	68	100
						- Pembangunan Penutup Atap Tribun Penonton Pamidangan	1	unit	1	1	1	100	1	1	100
						- Belanja Hibah Uang untuk pembangunan Peternakan Domba	1	Paket	1	1	1	100	1	1	100

						- Pengadaan Sapi Perah Ras FH	12	ekor	12	12	12	100	12	12	100
						- Pengadaan Ayam Ras Petelur dan pakan ikan ayam petelur	25.7	m2	25.7	25.7	25.7	100	25.7	25.7	100
3	2	3				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2	Unit	2	2	2	100	2	2	100
3	2	3	2			Kegiatan Pembangunan Sarana Pertanian	2	Unit	2	2	2	100	2	2	100
3	27	3	2	07	Sub Kegiatan Pembangunan.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan RPH Ciawitali dan Wanaraja	2	Unit	2	2	2	100	2	2	100
3	2	3	2			Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun Galur /Ternak dalam kabupaten/Kota	1	Lokasi	1	1	1	100	1	1	100
3	27	3	2	1	Sub Kegiatan Pelestarian Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	- Pengadaan lahan kawasan peternakan - apraisal belanja modal tanah - Penyusunan Masterplan Agrowisata Berbasis peternakan	8,351 1 1	M ² Dokumen Dokumen	8,351 1 1	8,351 1 1	8,351 1 1	100 100 100	8,351 1 1	8,351 1 1	100 100 100
3	2	4				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5	%	5	5	5	100	5	5	100
3	2	4	2			Kegiatan Penjaminan Kesehatan HewanPenutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah	42	Kecamatan	42	42	42	100	42	42	100

					Kabupaten/Kota										
3	27	4	2	1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	- Vaksinasi Rabies s.d bulan desember	3750	Dosis	750	750	750	100	750	750	20
						- Pengadaan kartu vaksinasi	3750	Lembar	750	750	750	100	750	750	20
						- Pengadaan Peralatan Medis	25	Jenis	5	5	5	100	5	5	20
						- Pengadaan Sarana dan Prasarana Obat - obatan	50	Jenis	10	10	10	100	10	10	20
3	27	4	2		Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	60	Bulan	12	12	12	100	12	12	20
3	27	4	2	1	Sub Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	- Terlaksananya jasa kesehatan Surveilance penyakit ternak unggas dan HPR s.d Bulan Desember	60	Kali	12	12	12	100	12	12	20
						- Terlaksananya jasa kesehatan Pengambilan sampel feses Ruminansia dan sampel darah unggas	3500	Sampel	700	700	700	100	700	700	20
3	27	4	2		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan medik veteriner	60	Bulan	12	12	12	100	12	12	20
3	27	4	2	02	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	- Terlaksananya pelayanan Pemeriksaan kesehatan Hewan dan Posyandu ternak s.d bulan Desember	5	Paket	1	1	1	100	1	1	20
						- Terlaksananya Pengadaan Peralatan Medis	5	Paket	1	1	1	100	1	1	20
						- Terlaksananya	1	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

					penyusunan DED Puskesmas Cikajang											
3	2	4	2		Kegiatan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	60	Bulan	12	12	12	100	12	12	20	
3	27	4	2	02	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	<ul style="list-style-type: none"> - leaflet - kalung Sehat - Pemeriksaan Hewan Kurban. - Bimtek Juru sembelih halal 	<ul style="list-style-type: none"> 500 10000 10,000 200 	<ul style="list-style-type: none"> Lembar Buah Ekor Orang 	<ul style="list-style-type: none"> 500 2000 2,000 40 	<ul style="list-style-type: none"> 500 2000 2,000 40 	<ul style="list-style-type: none"> 500 2000 2,000 40 	<ul style="list-style-type: none"> 100 100 100 100 	<ul style="list-style-type: none"> 500 2000 2,000 40 	<ul style="list-style-type: none"> 500 2000 2,000 40 		
						Total										100

Sumber : LKIP Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2021

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.2.1. Pencapaian Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), IKU dan dokumen Perjanjian Kinerja, Dinas Perikanan dan Peternakan pada Tahun 2021 menetapkan dua sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya produksi dan nilai tambah komoditas perikanan;
2. Meningkatnya produksi dan nilai tambah komoditas peternakan

Sesuai dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan target dan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi dan nilai tambah komoditas perikanan

Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan terdiri dari Sembilan indikator yaitu (1) Jumlah produksi perikanan budidaya, (2) jumlah produksi perikanan tangkap, dan (3) produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan, (4) Tingkat Konsumsi Ikan, (5) Cakupan Bina Kelompok Nelayan (6) Produksi Perikanan Kelompok Nelayan, (7) Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman, (8) Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial, dan (9) Nilai Tukar Nelayan .

Hasil dari sembilan indikator tersebut rata-rata mencapai sasaran sebesar 117,77 % dengan kriteria “Baik”. Pencapaian indikator tersebut sebagaimana disajikan pada tabel TC-30.

2. Meningkatnya produksi dan nilai tambah komoditas peternakan

Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil peternakan terdiri dari empat indikator yaitu (1) produksi daging, (2) produksi telur, (3) produksi susu dan (4) produksi olahan hasil peternakan pada kelompok peternak binaan; dan (5) Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan (%). Capaian rata-rata mencapai sasaran sebesar 101,90 % kriteria “**Baik**”. Pencapaian indikator tersebut sebagaimana disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut

N O	Indikator	SPM/Stand ar Nasion	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Indikator Sasaran 1												
1.	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)			63,731	64.368	65,012.00	65,662.00	59,520	64.218.58	65,012.00	65,662.00	
2.	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)			1,447	1.454	1,461	1,468	1,430	2.101.26	1,461	1,468	
3.	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (Ton)			721	765	743	765	655	863.9	743	765	
4.	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)			26.7	27			25.7	27.5			
5.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)			16	17			17.2	19.78			

6.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (ton)			503	506			468	609			
7.	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman (%)			18	18			18.25	26.3			
8.	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan (%)			2.93	2.93			2.93	3.66			
9.	Nilai Tukar Nelayan (poin)			109	109			101	101.5			
Indikator Sasaran 2												
10.	Produksi hasil Peternakan (Daging, Susu dan Telur) (Ton)					37,346	38,467			37,346	38,467	
11.	Produksi Daging (ton)			7,310	7.456			6.738	7.078,97			
12.	Produksi Telur (ton)			6,551	6.633			6.229	7.827,92			
13.	Produksi Susu (ton)			26,133	26.394			29.834	27.868,1			

14.	Produksi olahan hasil peternakan pada kelompok binaan (ton)			846	867	881.00	898.00	773	789	881.00	898.00	
15.	Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan			5	5			5	5			

Sumber : LKIP Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2021

Penjelasan tiap indikator pada sasaran 1 adalah sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 1: Produksi Perikanan Budidaya

Pada tahun 2021, capaian indikator jumlah produksi perikanan budidaya mencapai 64.218,58 ton. Produksi tersebut berasal dari perikanan budidaya kolam air tenang, kolam air deras, budidaya sawah atau minapadi dan budidaya tambak.

Apabila dibandingkan dengan target di tahun 2021 sebesar 64.368 ton, produksi perikanan budidaya Tahun 2021 belum mencapai target dengan tingkat capaian baru mencapai 99,76 %. Meskipun tidak mencapai target 100%, tetapi masih dalam kategori “**baik**” karena nilai pencapaiannya diatas 90%.

Produksi perikanan budidaya pada tiga tahun terakhir terjadi fluktuasi capaian kinerja pada tahun 2019 produksi perikanan budidaya mencapai 63,714 Ton, pada tahun 2020 sebesar 59,520 dan pada tahun 2021 mencapai 64.218,58 ton.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja tahun ini mengalami peningkatan dari 59,520 ton menjadi 64.218,58 ton atau meningkat sebesar 8,77 %. Dengan terjadinya peningkatan tersebut menggambarkan bahwa dengan adanya pandemic Covid 19 tidak menyurutkan para pelaku usaha perikanan budidaya untuk terus bertahan dan meningkatkan produksinya.

Langkah yang perlu dilakukan pemerintah adalah mendorong kenaikan permintaan produk hasil perikanan serta meningkatkan minat dan kemampuan masyarakat dalam budidaya perikanan. Selain itu peran serta pemerintah dalam pendampingan, pembinaan serta bantuan bibit ikan unggul turut mendorong kenaikan produksi perikanan di Kabupaten Garut.

Faktor pendukung yang perlu didorong dalam keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya adalah (1) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pembudidaya ikan dalam teknis budidaya, (2) peningkatan pembinaan dan pendampingan aparatur pemerintah terhadap masyarakat dalam pengelolaan usaha budidaya perikanan, (3) Upaya peningkatan

sistem pengelolaan sejumlah kelompok pembudidaya ikan dari sistem tradisional menjadi sistem semi-intensif dan intensif.

b. Indikator Kinerja 2: Produksi Perikanan Tangkap

Pada tahun 2021 Hasil produksi perikanan tangkap Kabupaten Garut mencapai 2.101,26 ton. Produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari produksi perikanan laut sebesar 90% dan sisanya dari produksi perikanan perairan umum seperti danau, sungai, rawa dan sebagainya. Apabila dibandingkan dengan target Target tahun 2021 sebesar 1.454 ton, produksi telah dapat mencapai target dengan tingkat capaian sebesar 144,52% dan masuk dalam kategori “baik”.

Meskipun telah melampaui target yang ditetapkan, Tahun 2021 masih tetap merupakan tahun yang berat bagi produksi perikanan tangkap terutama produksi perikanan laut. Faktor kondisi alam yang masih kurang mendukung bagi penangkapan ikan menyebabkan nelayan masih kesulitan mendapatkan hasil tangkapan. Selain itu dampak Covid 19 menyebabkan harga ikan laut terus menurun sehingga pendapatan nelayan secara umum ikut menurun.

Program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja produksi perikanan tangkap diantaranya melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui (1) kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, (2) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, (3) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 'Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, (4) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 'Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan 'Pembiayaan, Kemitraan Usaha

c. Indikator Kinerja 3: Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan

Untuk melihat sejauhmana nilai tambah yang dirasakan pembudidaya ikan dan nelayan dari hasil produksi perikanan, maka dilakukan analisis terhadap peningkatan produksi hasil perikanan. Data produksi ini terutama berasal dari survei terhadap kelompok pembudidaya ikan dan nelayan yang berada dalam lingkup binaan Dinas Perikanan dan Peternakan.

Produksi olahan hasil perikanan Tahun 2021 mencapai 863,9 ton. Bila dibandingkan dengan target Tahun 2021 sebesar 765 ton, maka capaian realisasi produksi olahan perikanan pada kelompok binaan mencapai 112,93 %. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 655 Ton maka produksi olahan perikanan pada kelompok binaan mengalami kenaikan sebesar 32 %. Capaian ini termasuk dalam kategori “**baik**” karena nilai pencapaiannya diatas 90%.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja peningkatan produksi olahan hasil perikanan dilaksanakan melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Diantaranya melalui pelaksanaan kegiatan (1) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil , (2) Kegiatan Penyediaan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan pelatihan dan pembinaan pada kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, untuk menjamin ketersediaan bahan baku, dilakukan upaya peningkatan produksi perikanan melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya melalui (1) Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil, (2) Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan, sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam

1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

d. Indikator Kinerja 4: Tingkat Konsumsi Ikan

Tingkat Konsumsi Ikan merupakan salah satu Indikator Kinerja Daerah di sektor perikanan sebagaimana ditetapkan melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tingkat Konsumsi ikan Kabupaten Garut untuk Tahun 2021 mencapai 27,07 kg/kapita/tahun. Bila dibandingkan dengan target Tahun 2021 sebesar 27 kg/kapita/tahun, maka capaian realisasi mencapai 100,25 %. Capaian tersebut masuk dalam kategori “**baik**” karena nilai pencapaiannya diatas 90%.

Tingkat konsumsi ikan dihitung berdasarkan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah produksi ikan dari dalam dan luar daerah Kab Garut}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

Tingkat konsumsi ikan Kabupaten Garut masih dibawah rata-rata konsumsi ikan Jawa Barat yang berada di angka 36,41 kg/kapita/pertahun. Sementara tingkat nasional ditargetkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di angka 56,39 Kg/kapita/pertahun.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja peningkatan konsumsi ikan dilaksanakan melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Diantaranya melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pembinaan pada kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta melalui acara Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan).

e. Indikator Kinerja 5: Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan Bina Kelompok Nelayan merupakan salah satu indikator kinerja daerah di sektor perikanan tangkap. Garut pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 135 lembaga. Terdiri dari Koperasi Nelayan sebanyak 12 unit terdiri dari 5 koperasi KUB dan 7 koperasi umum, Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebanyak 91 kelompok terdiri dari 85 KUB laut dan 5 KUB Perairan umum. Selain itu terdapat Kelompok Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan (Pokmaswas) sebanyak 14 kelompok terdiri dari pokmaswas laut 9 kelompok dan pokmaswas PUD sebanyak 5 kelompok. Untuk kelompok pengolah dan pemasaran (Poklahsar) terdapat sebanyak 17 kelompok.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, cakupan bina kelompok nelayan dihitung berdasarkan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pada tahun } n}{\text{Jumlah kelompok nelayan}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2021, dari total 91 kelompok nelayan KUB yang ada di Kabupaten Garut, yang telah mendapatkan bantuan dan pembinaan dari Dinas Perikanan dan Peternakan adalah sebanyak 18 kelompok. Terdiri dari 8 kelompok mendapatkan bantuan alat tangkap dan 10 kelompok mendapatkan bantuan sarana pengawasan. Dengan begitu capaian bina kelompok nelayan mencapai sebesar sebesar 19,78% dari total kelompok yang ada. Sudah melebihi dari target dengan tingkat capaian sebesar 116,35 % dengan kategori “baik”.

f. Indikator Kinerja 6: Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan merupakan salah satu indikator kinerja daerah di sektor perikanan sebagaimana ditetapkan melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Produksi ini diukur berdasarkan jumlah ikan yang masuk ke pelabuhan/ Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berasal dari kelompok nelayan binaan.

Produksi kelompok nelayan dihitung berdasarkan rumus sbb:

$$\frac{\text{Jumlah nelayan yang masuk anggota kelompok} \times \text{jumlah produksi}}{\text{Jumlah seluruh nelayan}}$$

Pada Tahun 2021, jumlah nelayan di Kabupaten Garut mencapai 6.177 orang. Sementara jumlah nelayan yang masuk

menjadi anggota kelompok nelayan (KUB) sekitar 1.820 orang atau sekitar 29,46%. Berdasarkan hal tersebut maka dari total produksi perikanan tangkap sebesar 2.101,26 ton, produksi perikanan kelompok nelayan mencapai 619 ton. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 506 ton, realisasi capaian produksi kelompok nelayan telah mencapai 120,36% dari target yang ditetapkan dan masuk kategori “baik”.

Program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja produksi kelompok nelayan perikanan tangkap diantaranya melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui (1) kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, (2) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, (3) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 'Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, (4) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 'Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan 'Pembiayaan, Kemitraan Usaha.

g. Indikator Kinerja 7: Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman merupakan salah satu indikator kinerja daerah di sektor perikanan sebagaimana ditetapkan melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Indikator ini ditujukan untuk melihat sejauhmana tingkat tangkapan nelayan bila dibandingkan dengan tangkapan maksimum lestari/ Maximum Sustainable Yield (MSY).

Indikator ini dihitung berdasarkan rumus sbb:

$$= \frac{\text{Jumlah tangkapan ikan}}{80\% \text{ dari tangkapan maksimum lestari}} \times 100\%$$

Tangkapan maksimum lestari/ Maximum Sustainable Yield (MSY) di Kabupaten Garut pada zona teritorial 4 mil laut diperkirakan sebesar 10.000 ton. Maka 80% dari MSY berarti ada pada angka 8.000 ton. Jumlah tangkapan nelayan pada Tahun 2021 sebesar 2.101 ton. Berdasarkan hasil rumus diatas, maka didapat bahwa indikator Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman berada pada angka 2.101 ton dibagi 8000 ton atau sebesar 26,3%. Bila dibandingkan dengan target Tahun 2021 sebesar 18%, maka terdapat kenaikan sebesar 146,11%. Dengan angka ini dapat disimpulkan bahwa meskipun ada kenaikan presentase, tangkapan ikan para nelayan masih berada pada angka aman karena masih berada dibawah MSY.

h. Indikator Kinerja 8: Rasio Kawasan Lindung Peariran terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Rasio Kawasan Lindung Peariran terhadap Total Luas Perairan Teritorial merupakan salah satu indikator kinerja daerah di sektor perikanan tangkap. Indikator ini bertujuan untuk membandingkan luasan kawasan lindung yang ada di perairan dibandingkan dengan total luas perairan teritorial.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kawasan Lindung Peariran terhadap Total Luas Perairan Teritorial sebagaimana ditetapkan melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. adalah:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Luasan kawasan lindung}}{\text{Total luas perairan teritorial}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021, total luasan kawasan pesisir pantai Kabupaten Garut yang perlu dilindungi mencapai 674,9 Ha. Terdiri

dari potensi luasan mangrove mencapai 50,9 Ha, Padang lamun seluas 75 Ha, Terumbu Karang 525 Ha dan estuaria sebesar 24 Ha.

Zona teritorial Kabupaten Garut adalah 12 mil laut. Dengan asumsi 1 mil laut = 1.852 km maka zona teritorial Kabupaten Garut sepanjang 22.24 km. Dengan panjang pantai 83 km, maka total luas wilayah perairan Kabupaten Garut untuk zona teritorial adalah $22.24 \text{ km} \times 83 \text{ km} = 1.845,92 \text{ km}^2$. Dengan asumsi 1 km² adalah 100 hektar, maka total luas wilayah teritorial perairan laut Kabupaten Garut adalah 184.592 Ha.

Dengan hitungan diatas, maka rasio luasan kawasan yang harus dilindungi adalah

$$\text{Rasio} = \frac{674,9 \text{ Ha}}{184.592 \text{ Ha}} \times 100\%$$

Dari hitungan diatas, dihasilkan angka sebesar 3.66%. Dari target sebesar 2.93% maka indikator ini mencapai 124.91% dengan kategori “Baik”..

i. Indikator Kinerja 9: Nilai Tukar Nelayan

Indikator Nilai Tukar Nelayan merupakan salah satu indikator kinerja daerah di sektor perikanan sebagaimana ditetapkan melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Indikator ini bertujuan untuk melihat peningkatkan kesejahteraan nelayan berdasarkan indeks yang diterima dan dibayar nelayan. Rumus Nilai Tukar Nelayan adalah:

$$\text{NTN} = \frac{\text{Indeks yang Diterima Nelayan}}{\text{Indeks yang dibayar nelayan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021, Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Garut mencapai angka 101. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 109, baru mencapai target sebesar 93,12% dengan kategori “baik”. Meskipun Nilai Tukar Nelayan tidak mencapai target, tetapi angka ini masih menunjukkan bahwa nelayan masih mengalami peningkatan selisih antara pendapatan dan pengeluaran meskipun sangat kecil.

Nilai Tukar Nelayan pada periode dua tahun terakhir memang mengalami penurunan yang signifikan. Pada Tahun 2019 nilai NTN sempat mencapai angka 108. Tapi setelah memasuki tahun 2020, dimana wabah Covid 19 mulai melanda Indonesia, nilai NTN terus mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini dimungkinkan karena pada saat pengukuran, nelayan sudah mengalami dampak dari adanya wabah Covid 19 di Indonesia terutama dari sisi penurunan harga jual ikan sehingga pendapatan nelayan mengalami penurunan. Meskipun begitu, bila dibandingkan dengan Nilai Tukar Nelayan tahun sebelumnya sebesar 101, maka Tahun 2021 Nilai Tukar Nelayan mengalami peningkatan sebesar 5%.

Untuk mendorong peningkatan NTN, salah satunya dilakukan melalui peningkatan nilai tambah yang didapat nelayan melalui Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 'Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan 'Pembiayaan, Kemitraan Usaha. Diantaranya melalui pelatihan pengolahan ikan laut bagi kelompok wanita nelayan serta bantuan sarana prasarana pengolahan ikan untuk masyarakat kategori miskin dan terdampak Covid 19. Dengan begitu, pendapatan rumah tangga nelayan bisa meningkat.

Sebagaimana tabel diatas, pencapaian indikator sasaran 2 diukur dari 5 (lima) indikator yaitu (1) produksi daging, (2) produksi telur, (3) produksi susu; (4) produksi olahan hasil peternakan pada kelompok peternak binaan dan (5) Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan. Secara rata-rata tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2021 dari kelima indikator tersebut adalah sebesar 101,90 % dimana ada tiga indikator yang mencapai target dan dua indikator yang belum mencapai target. Meskipun begitu, seluruh indikator telah mencapai kriteria Baik karena rata-rata tercapai diatas 90%.

Rincian penjelasan pencapaian kinerja disajikan sebagai berikut:

a. Indikator 1: Produksi Daging

Produksi daging dihitung berdasarkan laporan pemotongan ternak dari Rumah Potong Hewan (RPH) serta Rumah Potong

Unggas (RPU) ditambah dari laporan dari tempat pemotongan di luar RPH/RPU. Pada tahun 2021, Produksi hasil peternakan untuk daging mencapai total produksi sebesar 7.078,97 ton atau sebesar 94,94 % dari target tahun 2021 sebesar 7.456 ton. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 produksi daging belum mencapai target . Meskipun begitu, capaian kinerja masih diatas 90% dengan kategori "Baik".

Produksi daging di Kabupaten Garut terutama berasal dari produksi daging sapi, daging domba dan ayam. Kontribusi produksi daging tertinggi berasal dari daging ayam sebesar 39,24 %, diikuti oleh daging sapi sebesar 26,73 %, daging domba sebesar 26 % dan daging kambing sebesar 2,73 %.

Produksi daging sapi Tahun 2021 mencapai 1.892,73 ton atau mencapai 26,73 % dari total produksi daging di Kabupaten Garut. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian produksi daging sapi tahun ini masih belum memenuhi harapan. Hal ini disebabkan pemotongan ternak sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) masih mengalami penurunan. Salah satunya disebabkan sampai saat ini Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Garut belum memiliki fasilitas untuk pemotongan sapi impor sehingga hanya mengandalkan produksi dari sapi lokal. Sarana prasarana RPH yang terbatas juga menyebabkan banyak peternak yang lebih memilih memotong sapi ke wilayah luar Garut atau dipotong diluar RPH.

Upaya peningkatan produksi daging sapi Tahun 2021 dilaksanakan melalui Program Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan sejumlah kegiatan diantaranya (1) kegiatan peningkatan sarana prasarana peternakan (2) kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Pada Masyarakat (3) Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan Ternak (4) Peningkatan sarana prasarana usaha peternakan, (5) Pengadaan ternak sapi potong PO serta (6) Pengembangan sapi potong keturunan (*cross breeding*).

Upaya yang perlu dilakukan untuk mendongkrak kinerja indikator produksi daging sapi diantaranya adalah dengan (1) mendorong minat masyarakat untuk mengembangkan budidaya

sapi potong; (2) meningkatkan kualitas bibit sapi potong di masyarakat; (3) melakukan fasilitasi tata niaga pasar melalui pengembangan sarana prasarana pasar Ternak dan pengembangan kemitraan pemasaran, (4) meningkatkan diversifikasi produk hasil usaha peternakan dan (5) meningkatkan pelayanan aparaturnya melalui pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna dalam mendorong populasi dan produksi ternak.

Selain daging sapi, daging domba juga memberikan kontribusi besar bagi produksi daging. Pada tahun 2021, produksi hasil peternakan untuk Daging Domba mencapai 1.840,53 ton. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja tahun ini mengalami peningkatan. Faktor pendukung keberhasilan peningkatan produksi daging domba diantaranya selain masyarakat Kabupaten Garut sudah familiar dengan peternakan domba, permintaan pasar yang tinggi akan komoditas ini menyebabkan harganya terus meningkat setiap tahun sehingga mendorong para peternak untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Domba telah menjadi komoditas primadona di masyarakat terutama menjelang Hari Raya Qurban. Kesadaran beragama masyarakat yang terus meningkat terutama terkait upacara akikah menyebabkan permintaan akan domba terus ada sepanjang tahun sehingga turut mendorong peningkatan produksi.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja produksi daging domba dilaksanakan melalui Program Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian yang didukung dengan kegiatan (1) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, Tumbuhan, Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan Peningkatan SDG Hewan/tanaman berupa penyediaan sarana dan prasarana inseminasi buatan, sub kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman, (2) Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah

Kabupaten/Kota Lain, Serta didukung dengan program Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian melalui sub kegiatan Pembangunan Prasarana pertanian sub kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Porong Hewan

Kontribusi terbesar produksi daging di Kabupaten Garut masih didominasi daging ayam. Untuk produksi daging ayam, Pada tahun 2021, Produksi hasil peternakan untuk Daging Ayam mencapai 2.777,30 ton atau sebesar 39,24 % dari total produksi daging yang dihasilkan di Kabupaten Garut. Produksi daging ayam berasal dari daging ayam buras (ayam kampung) serta daging ayam ras (broiler). Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian produksi daging ayam tahun 2021 mengalami sedikit penurunan. Hal ini disebabkan harga pakan yang tinggi mengakibatkan peternak ayam mandiri mengurangi jumlah kepemilikan ayam nya. Walaupun demikian capaian produksi daging ayam masih yang tertinggi.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya upaya aparaturnya Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melakukan pembinaan dan pemberian bantuan ternak khususnya untuk ayam ras. Selain itu upaya pencegahan penyakit hewan/ternak menular melalui aktivitas vaksinasi AI/Flu Burung dan pemberian obat-obatan turut memberikan dampak positif pada kesehatan ternak yang pada akhirnya akan turut mendorong meningkatnya produksi daging ayam.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja produksi daging ayam diantaranya dicapai melalui Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian yang didukung oleh Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang didukung dengan kegiatan diantaranya (1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, (2) Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan (3) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (4) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.

b. Indikator 2: Produksi hasil peternakan Telur

Pada tahun 2021, indikator Produksi hasil peternakan untuk telur mencapai 7.827,92 ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2021 sebesar 6.633 ton, telah mencapai target dengan tingkat capaian 118,01 %.

Sebagian besar produksi telur di Kabupaten Garut masih didominasi telur ayam buras atau ayam kampung sebesar 83,25 %, dari itik sebesar 3,35 % dan dari telur ayam ras sebesar 13,38 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja produksi telur pada tahun ini mengalami kenaikan. Kenaikan signifikan terutama pada produksi ayam ras dimana jumlah peternak yang berusaha di sektor ayam ras petelur ini meningkat pesat pada tahun-tahun terakhir.

Faktor pendukung pencapaian kinerja produksi telur diantaranya adalah meningkatnya jumlah populasi ayam buras dan itik sehingga secara tidak langsung berdampak pada peningkatan produksi telur. Dalam rangka mendorong peningkatan produksi telur di Kabupaten Garut, perlu dilakukan upaya dalam rangka mendorong berkembangnya peternakan ayam ras petelur karena sampai saat ini produksi telur di Kabupaten Garut masih didominasi produk dari luar.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja produksi telur diantaranya dicapai melalui Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian yang didukung oleh Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui kegiatan (1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, (2) Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan (3) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (4) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.

c. Indikator 3: Produksi hasil peternakan Susu

Pada tahun 2021, Produksi hasil peternakan untuk susu mencapai 27.868,1ton dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2021 sebesar 26.394 ribu ton telah mencapai target yang

ditetapkan dengan tingkat capaian 105,58 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun lalu sebesar 6,5 %.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja produksi susu pada Tahun 2021 salah satunya disebabkan minat petani untuk memelihara sapi perah cenderung meningkat. Mulai Bergeraknya sektor swasta diluar KUD untuk menampung hasil susu dari masyarakat dengan penawaran harga yang lebih baik juga turut mendorong minat masyarakat untuk meningkatkan kapasitas usahanya yang berdampak pada peningkatan produksi susu. Perkembangan positif tersebut dapat dilihat dari usaha ternak sapi perah yang mulai berkembang tidak hanya di wilayah sentra produksi seperti Cikajang, Cigedug dan Cisarupan, tapi juga sudah mulai berkembang ke kecamatan lain seperti Cilawu, Bayongbong dan Tarogong Kaler.

Peningkatan produksi susu pada dua tiga tahun terakhir, meskipun tidak signifikan, tetapi memberi angin segar bagi masyarakat bahwa prospek usaha Sapi Perah masih cukup menjanjikan. Hal ini dibuktikan juga dengan masuknya sejumlah pengusaha luar daerah untuk mengembangkan produksi Sapi Perah di Kabupaten Garut. Melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, tampaknya Kabupaten Garut masih tetap bisa diharapkan sebagai salah satu sentra produksi susu di Jawa Barat.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya melalui Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan kegiatan Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Perah serta Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Peternakan. Selain itu, upaya pembinaan dan pendampingan masyarakat yang dilakukan pemerintah terutama dalam kaitannya dengan pembinaan budidaya dan peningkatan kualitas produksi telah turut mendorong tercapainya target kinerja.

d. Indikator 4: Produksi Olahan Hasil Peternakan

Pada tahun 2021, Produksi olahan hasil peternakan pada kelompok binaan Dinas Perikanan dan Peternakan mencapai 789 ton atau tercapai sebesar 91. % dari target yang ditetapkan. Meskipun tidak mencapai target, tetapi masih masuk kategori Baik karena nilai capaiannya diatas 90%. Penurunan produksi olahan hasil peternakan terutama disebabkan mewabahnya pandemik Covid 19 yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk olahan hasil peternakan.

Produk olahan hasil peternakan terutama masih didominasi produk kulit yang digunakan untuk membuat produk fashion dan produk makanan, produk telur asin, olahan bakso dan olahan susu.

e. Indikator 5: Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan

Indikator Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan merupakan indikator dari tingkat pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan. Indikator ini mencapai target 100%. Ini artinya pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang diselenggarakan Dinas Perikanan dan Peternakan telah mencapai target sesuai harapan.

Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang diselenggarakan Dinas Perikanan dan Peternakan pada Tahun 2021 didukung Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak melalui kegiatan (1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, (2) Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan (3) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (4) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam serta memperdalam kepercayaan masyarakat pada pemerintahan dan administrasi publik.

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana hasil penyusunan IKM ini merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu IKM dapat menjadi bahan evaluasi terhadap unsur pelayanan yang masih perlu diperbaiki dan menjadi pendorong setiap penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Penilaian IKM diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maka Dinas Perikanan dan Peternakan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2014 Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan di lingkungan

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut. Ada sembilan pelayanan di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut yang disurvei langsung ke masyarakat yaitu:

- a. Pelayanan Rekomendasi Teknis Kelayanan Usaha Perikanan dan Peternakan;
- b. Pelayanan Pembibitan ternak dan IB
- c. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);
- d. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
- e. Pelayanan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Hewan;
- f. Pelayanan Pemotongan Hewan;
- g. Pelayanan Penyediaan Benih/Bibit Ikan Unggul;
- h. Pelayanan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Ikan;
- i. Pelayanan Pelelangan Ikan.

Survei dilaksanakan sepanjang Tahun 2021. Hasil kuisioner dari seluruh responden dimasukkan dalam aplikasi Sistem Evaluasi Pelayanan Publik Dinas Perikanan dan Peternakan untuk dianalisis.

Dari hasil pengukuran IKM diperoleh hasil secara umum kinerja pelayanan publik di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut berkinerja baik dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2021

No	Jenis Layanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	Pelayanan Rekomendasi Usaha Perikanan dan Peternakan	80,25	B	Baik
2.	Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)	96,40	A	Sangat Baik
3.	Pelayanan Pemotongan Hewan	78,15	B	Baik

4.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan	86,35	B	Baik
5.	Pelayanan Pembibitan Ternak dan IB	83,50	B	Baik
6.	Pelayanan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Hewan	76,10	B	Baik
7.	Pelayanan Penyediaan Benih Ikan Unggul	77,65	B	Baik
8.	Pelayanan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Ikan	72,15	B	Baik
9.	Pelayanan Pelelangan ikan	74,75	B	Baik
	Rata - Rata	80,58	B	Baik

Sumber : Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Perikanan dan Peternakan Semester 2 Tahun 2021

Berdasarkan penilaian terhadap seluruh unsur pelayanan diatas, maka nilai IKM Dinas Perikanan dan Peternakan mendapatkan skor rata-rata sebesar **80.58** dengan kategori **“BAIK”**. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar **80,42**, terdapat peningkatan sebesar **0.16** poin.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas SKPD

2.3.1 Permasalahan Sektor Peternakan

Lingkup kerja bidang peternakan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Garut yang terdiri dari 42 kecamatan. Pembangunan bidang peternakan masih tetap ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para peternak serta memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai usaha

tersebut adalah dengan mengutamakan penggunaan potensi lokal dan teknologi tepat guna.

Dalam pelaksanaan pembangunan, kegiatan pembangunan bidang Peternakan dibantu oleh 8 UPT wilayah Kecamatan serta 3 UPT Kabupaten yang terdiri dari UPT Rumah Potong Hewan sebanyak 2 unit (RPH Tarogong dan Wanaraja), UPT Pasar Hewan sebanyak 2 unit (Pasar Hewan Bayongbong dan Wanaraja) dan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 5 unit.

Selain terkait dengan pemenuhan pangan, bidang peternakan juga memiliki tugas dalam meningkatnya pengetahuan dan peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Program yang dilaksanakan diantaranya dengan mendorong pola hidup bersih dan sehat, meningkatkan pemetaan dan pengawasan penyakit hewan menular dan zoonosis serta meningkatkan rasa aman masyarakat terhadap konsumsi Bahan Asal Hewan (BAH) yang memenuhi syarat kesehatan.

Beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan bidang peternakan selama ini antara lain :

1. Usaha peternakan belum mengutamakan pada skala usaha ekonomis.
2. Tingkat pengetahuan dan keterampilan peternak belum optimal.
3. Ketersediaan sumber pakan hijauan belum dikelola secara intensif dan terpadu
4. Kelembagaan kelompok peternak belum optimal
5. Masih rendahnya akses permodalan ditingkat kelompok peternak,
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak menular.
7. Jumlah petugas teknis di lapangan masih kurang.

2.3.2. Permasalahan Sektor Perikanan

Pembangunan bidang perikanan ditujukan untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan potensi lahan Perikanan melalui penerapan teknologi tepat guna. Meningkatkan produktivitas perikanan baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan gizi masyarakat maupun untuk meningkatkan devisa negara melalui pengembangan komoditi ekspor; meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani ikan

dan nelayan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta memelihara kelestarian sumber hayati perikanan dan ekosistem perairan.

Lingkup kerja bidang perikanan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Garut yang terdiri dari 42 kecamatan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Bidang Perikanan dibantu oleh 8 UPT Wilayah dan 2 UPT Kabupaten yang terdiri dari UPTD Perikanan Budidaya (Balai Benih Ikan dan Pasar Ikan) dan UPT Tempat Pelelangan Ikan.

Beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan perikanan selama ini adalah sebagai berikut :

1. Usaha perikanan masih dikelola sebagai usaha tani sampingan
2. Potensi lahan Perikanan dalam kegiatan instenfikasi budidaya mina padi belum dikelola secara optimal
3. Terjadinya alih fungsi kepentingan penggunaan lahan yang menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas perairan
4. Kelembagaan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan belum optimal dan masih rendahnya akses teknologi dan inovasi
5. Masih sering terjadinya alih fungsi kepentingan penggunaan lahan sepadan pantai
6. Terjadinya kerusakan ekosistem laut
7. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan

2.3.3. Permasalahan Internal

Identifikasi permasalahan internal dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi positif dan negatif dari internal organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan. Identifikasi ini dimaksudkan agar pemerintah, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Peternakan, dapat memaksimalkan potensi dirinya dalam upaya mencapai visi dan misi. Identifikasi permasalahan internal terdiri dari dua unsur yaitu kekuatan dan kelemahan organisasi.

Kekuatan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya aparatur dengan komitmen yang tinggi dan berorientasi pada pencapaian visi dan misi
2. Adanya dukungan anggaran yang berbasis kinerja baik dari

pemerintah pusat, provinsi maupun daerah

3. Adanya kelembagaan yang sesuai dengan bidang kewenangan
4. Adanya program pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
5. Kondisi keamanan dan politik yang relatif stabil dengan terbentuknya kepemimpinan yang baru sebagai hasil pilihan langsung masyarakat
6. Jumlah penduduk usia produktif yang bergerak di sektor usaha peternakan, perikanan dan kelautan cukup tinggi
7. Adanya keinginan dan kesadaran masyarakat untuk meraih kemajuan dan bangkit dari ketertinggalan ekonomi
8. Masih tumbuhnya jiwa gotong royong, kebersamaan dan kerukunan antar warga masyarakat.
9. Sumber daya alam relatif cukup melimpah dan beragam sehingga bisa dimanfaatkan dalam mendukung peningkatan pembangunan sektor peternakan, perikanan dan kelautan

Kelemahan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut dalam pembangunan mendatang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Rendahnya daya dukung fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi aparatur
2. Belum optimalnya akses aparatur terhadap teknologi informasi dan teknologi tepat guna
3. Terdapatnya kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan dukungan anggaran yang tersedia
4. Kurangnya jumlah aparatur dan petugas teknis bila dibandingkan cakupan area kerja yang luas
5. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan sarana prasarana SKPD dalam mendukung pelayanan masyarakat
6. Kondisi geografis beberapa daerah yang relatif sulit dijangkau dan rawan bencana alam
7. Belum optimalnya kemampuan kelembagaan usaha masyarakat dalam mengakses manajemen usaha, permodalan, teknologi tepat guna dan tata niaga pasar

Upaya yang dilakukan secara internal dalam mengantisipasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan dilakukan dengan cara:

1. Melakukan perbaikan kinerja secara terus-menerus dalam meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM melalui aktifitas peningkatan disiplin aparatur dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
3. Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai amanat undang-undang secara efektif, efisien dan tepat sasaran dengan mengedepankan prinsip *good governance*;
4. Meningkatkan fungsi perencanaan, evaluasi dan pelaporan melalui peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara transparan dan akuntabel;
5. Peningkatan Sarana Prasarana aparatur dalam menunjang kinerja organisasi secara efektif dan efisien.
6. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan dengan organisasi dan lembaga terkait serta *stakeholder* di sektor peternakan, perikanan dan kelautan

2.3.4 Tantangan

Sebagai salah satu dinas teknis yang memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Garut, Dinas Perikanan dan Peternakan harus siap menghadapi tantangan yang cukup berat di masa depan. Era globalisasi dan otonomi daerah merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus diantisipasi sejak dini dalam rangka meningkatkan upaya mensejahterakan masyarakat.

Tantangan dan peluang dari kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan harus siap menghadapi segala ancaman yang mungkin akan mengganggu pelaksanaan kinerja. Berdasarkan hasil identifikasi SWOT, ancaman yang mungkin muncul dalam pembangunan sektor peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Garut 3 (tiga) tahun ke depan diformulasikan sebagai berikut :

- Kondisi ekonomi makro yang belum stabil

- Dampak negatif arus informasi dan globalisasi yang semakin cepat
- Kebijakan pemerintah yang mengarah pada pasar bebas menyebabkan membanjirnya produk-produk impor yang berpotensi menyulitkan daya saing produk lokal untuk bersaing di tingkat regional, nasional maupun internasional
- Ditetapkannya 80% wilayah Kabupaten Garut sebagai kawasan lindung oleh pemerintah provinsi Jawa Barat menyebabkan sulitnya pengembangan wilayah untuk sektor peternakan, perikanan dan kelautan
- Terjadinya penurunan daya dukung lingkungan akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lahan secara lestari
- Masih terjadinya konflik kepentingan dalam perencanaan pembangunan yang berpotensi memunculkan kebijakan yang tidak pro-rakyat dan tidak tepat sasaran sehingga bisa menghambat pembangunan

Tantangan yang dihadapi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut antara lain :

- Wilayah dan komoditi peternakan, perikanan dan kelautan yang diusahakan masyarakat pada umumnya belum mengutamakan pada skala usaha ekonomis sehingga perlu dibentuk kawasan terpadu berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran.
- Profesionalisme, pengetahuan dan keterampilan peternak dan petugas, baik dalam proses produksi maupun pasca produksi, serta kemampuan manajemen usaha pemasarannya belum optimal.
- Kabupaten Garut memiliki potensi lahan peternakan, perikanan dan kelautan yang cukup luas untuk dikembangkan sehingga perlu lebih dioptimalkan dengan sistem pengelolaan yang intensif dan terpadu.
- Keterbatasan akses permodalan menyebabkan kebutuhan permodalan ditingkat kelompok usaha masih sulit terpenuhi, sehingga perlu ada upaya sinergis dalam meningkatkan permodalan melalui kerjasama dengan instansi dan lembaga keuangan terkait.
- Jumlah dan kualitas petugas teknis di lapangan masih kurang seimbang dibandingkan dengan luasnya jangkauan wilayah kerja serta masih kurang didukung oleh ketersediaan sarana transportasi dan fasilitas kerja yang memadai.

- Semakin menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan bagi pengembangan pembangunan di sektor peternakan, perikanan dan kelautan perlu diantisipasi melalui aktifitas pelestarian lingkungan dan pengembangan tata kelola lahan secara lestari
- Perlunya penataan kelembagaan petani/peternak, pembudidaya ikan dan nelayan sebagai wadah belajar bersama dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sistem dan mekanisme pasar serta rantai tata niaga pemasaran.
- Proses pelaksanaan alih teknologi dari hasil – hasil penelitian menjadi teknologi terapan yang praktis, masih sering terkendala oleh terbatasnya jumlah dan kualitas petugas dilapangan sehingga perlu dicari solusi yang efektif.

Mengingat tantangan yang semakin besar di masa depan tersebut, maka perlu ada upaya perencanaan secara sistematis dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara lebih efisien dan efektif sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

2.3.5. Peluang

Peluang untuk pembangunan sektor peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Garut diformulasikan sebagai berikut :

- Terbukanya peluang pengembangan usaha dan investasi khususnya di sektor peternakan, perikanan dan kelautan.
- Pemberlakuan otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan pemanfaatan potensi lokal secara optimal
- Semakin kondusifnya iklim demokratis dan mulai tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- Terbukanya akses terhadap informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi terkait informasi peluang usaha dan pasar baik regional maupun global
- Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat dalam pemberian modal bagi pengembangan usaha kecil dan menengah termasuk petani dan nelayan
- Meningkatnya perhatian pemerintah pusat maupun provinsi bagi pengembangan daerah melalui berbagai bantuan keuangan baik melalui DAK, Bantuan Provinsi/BanGub maupun Tugas Pembantuan

- Kondisi geografis Kabupaten Garut dengan topografi pegunungan dan pantai yang sangat sesuai bagi pengembangan komoditas peternakan, perikanan dan kelautan
- Akses Kabupaten Garut sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi dan Pusat cukup memadai dalam meningkatkan pemasaran hasil produksi peternakan dan perikanan
- Pembangunan jalan lintas selatan jawa sebagai akses horizontal bagian selatan yang mendukung pengembangan potensi kelautan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu dilakukan dengan melakukan langkah sebagai berikut :

- a. Identifikasi program dan/atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan:
- c. Catatan penting berisi hasil temuan apabila terjadi perbedaan antara kebutuhan dan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besaran volume/target serta anggaran berbeda, perbedaan indikator kinerja dengan RKPD dan lainnya

Sesuai dengan amanat undang-undang, setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan harus dilakukan secara partisipatif. Hal tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang dilaksanakan dari mulai dari Tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kabupaten/Kota. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah

diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan *bottom up* dengan perencanaan yang bersifat *top down* sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2023 memiliki tema “Penguatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, program, kegiatan unggulan pembangunan Kabupaten Garut di sektor perikanan dan peternakan diantaranya adalah:

1. Pengembangan kawasan peternakan (Balai Peternakan) di Desa Sukaluyu Kec. Sukawening.
2. Pembangunan pasar ikan modern di Tarogong Kaler;
3. Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) sesuai standar Nomor Kontrol Veteriner di Kecamatan Limbangan;
4. Pengembangan sarana prasarana Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)/ Rumah Sakit Hewan (RSH);
5. Pengembangan sentra produksi perikanan;
6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
7. Pengembangan sarana eduwisata Balai Benih Ikan (BBI); dan
8. Optimalisasi bantuan kepada kelompok tani, nelayan dan kelompok ternak

Dalam rancangan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023, ditetapkan sebanyak 10 program. Program tersebut terdiri atas 1 (satu) program kesekretariatan, 4 (empat) program urusan bidang kelautan dan perikanan dan 5 (lima) program urusan bidang pertanian (peternakan). Adapun rencana program tersebut meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
3. Program Pengelolaan Perikanan Budiaya;
4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
9. Program Perizinan Usaha Pertanian;
10. Program Penyuluhan Pertanian.

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Garut

Dinas Perikanan dan Peternakan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Pemenuhan kinerja pelayanan SKPD	100%	15,422,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Pemenuhan kinerja pelayanan SKPD	100%	15,422,000	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Pemenuhan Dokumen perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	100%	288,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pemenuhan Dokumen perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	100%	288,000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Pemenuhan Administrasi keuangan Perangkat daerah		11,930,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pemenuhan Administrasi keuangan Perangkat daerah		11,930,000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	170,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat	100%	170,000	

								Daerah			
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	100%	646,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	100%	646,000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100%	1,211,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100%	1,211,000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Pemenuhan administrasi penunjang urusan pemerintah daerah	100%	582,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan administrasi penunjang urusan pemerintah daerah	100%	582,000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Persentase sarana prasarana aparatur kondisi baik	100%	595,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana prasarana aparatur kondisi baik	100%	595,000	
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Persentase Produksi Perikanan Tangkap	0.50%	4,850,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Persentase Produksi Perikanan Tangkap	0.50%	4,850,000	
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Persentase peningkatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	10%	2,620,000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang		Persentase peningkatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,	10%	2,620,000	

	Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Pameungpeuk, Kab. Garut, Pameungpeuk, Jatimulya Kab. Garut, Cibalong Kab. Garut, Cibalong, Sancang Kab. Garut, Cikelet Kab. Garut, Bungbulang Kab. Garut, Mekarmukti Kab. Garut, Mekarmukti, Jayabaya Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana Kab. Garut, Pakenjeng Kab. Garut, Caringin Kab. Garut, Caringin, Indralayang Kab. Garut,	Peningkatan kemampuan usaha nelayan dan masyarakat pesisir	10%	1,530,000	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan kemampuan usaha nelayan dan masyarakat pesisir	10%	1,530,000	

		Caringin, Purbayani									
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Garut, Pameungpeuk Kab. Garut, Cibalong Kab. Garut, Mekarmukti Kab. Garut, Pakenjeng Kab. Garut, Caringin	Peningkatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	10%	700,000	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Peningkatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	10%	700,000	
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Persentase produksi perikanan budidaya		7,711,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Persentase produksi perikanan budidaya		7,711,000	
1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Prosentase Peningkatan Kapasitas Produksi Hasil perikanan		2,461,000	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Prosentase Peningkatan Kapasitas Produksi Hasil perikanan		2,461,000	
2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Persentase Peningkatan dan Penjaminan ketersediaan sarana prasarana budidaya perikanan serta promosi hasil perikanan	10%	5,250,000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Persentase Peningkatan dan Penjaminan ketersediaan sarana prasarana budidaya perikanan serta promosi hasil perikanan	10%	5,250,000	
IV	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Lokasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan		400,000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Lokasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan		400,000	
1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di	Kab. Garut, Banyuresmi Kab. Garut,	Persentase peningkatan pengawaan		400,000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di		Persentase peningkatan pengawaan		400,000	

	Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pameungpeuk Kab. Garut, Cibalong Kab. Garut, Cikelet Kab. Garut, Mekarmukti Kab. Garut, Pakenjeng Kab. Garut, Caringin	sumberdaya perikanan			Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		sumberdaya perikanan			
V	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	3%	1,351,000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	3%	1,351,000	
1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Persentase pembinaan mutu dan keamanan pangan	10%	375,000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Persentase pembinaan mutu dan keamanan pangan	10%	375,000	
2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Peningkatan ketersediaan dan penyaluran bahan baku pengolahan ikan	3%	976,000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Peningkatan ketersediaan dan penyaluran bahan baku pengolahan ikan	3%	976,000	
VI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	3%	21,932,000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	3%	21,932,000	

1	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Persentase Pengelolaan sumberdaya generik hewan	10%	1,540,000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan sumberdaya generik hewan	10%	1,540,000	
2	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Persentase peningkatan Pengendalian dan Pendistribusian Bibit ternak dan HPT	10%	1,262,000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan Pengendalian dan Pendistribusian Bibit ternak dan HPT	10%	1,262,000	
3	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Garut, Semua Kecamatan	peningkatan populasi ternak	0,5 %	19,130,000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		peningkatan populasi ternak	0,5 %	19,130,000	
VII	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Prasarana yang dibangun/ dikembangkan	10%	6,765,000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Prasarana yang dibangun/ dikembangkan	10%	6,765,000	
1	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Persentase Peningkatan prasarana pertanian	15%	3,565,000	Pembangunan Prasarana Pertanian		Persentase Peningkatan prasarana pertanian	15%	3,565,000	
2	Pengelolaan Wilayah Sumber	Kab. Garut, Sukawening	Pengembangan Sentra Pembibitan	1 Kawasan	3,200,000	Pengelolaan Wilayah Sumber		Pengembangan Sentra	1 Kawas	3,200,000	

	Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	, Mekarluayu	Ternak (Kawasan)			Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Pembibitan Ternak (Kawasan)	an		
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase peningkatan layanan kesehatan hewan dan kesmavet	5%	1,630,000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase peningkatan layanan kesehatan hewan dan kesmavet	5%	1,630,000	
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Prosentase Peningkatan Pelayanan kesehatan hewan melalui vaksinasi dan pengobatan penyakit ternak	5%	300,000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Pelayanan kesehatan hewan melalui vaksinasi dan pengobatan penyakit ternak	5%	300,000	
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Prosentase Peningkatan Pengawasan Hewan dan Produk Asal hewan (PAH) dalam satu tahun	5%	250,000	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Pengawasan Hewan dan Produk Asal hewan (PAH) dalam satu tahun	5%	250,000	
3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Persentase Peningkatan sarana Prasarana Pelayanan Keswan	5%	830,000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan sarana Prasarana Pelayanan Keswan	5%	830,000	

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Persentase Peningkatan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	5%	250,000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase Peningkatan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	5%	250,000	
IX	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Peningkatan pelayanan rekomendasi perizinan usaha peternakan	5%	50,000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Peningkatan pelayanan rekomendasi perizinan usaha peternakan	5%	50,000	
1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Penerbitan Izin usaha Peternakan dan kesehatan hewan	12 Laporan	50,000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penerbitan Izin usaha Peternakan dan kesehatan hewan	12 Laporan	50,000	
X	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Peningkatan Bimbingan dan penyuluhan terhadap kelompok Peternak dan pelaku usaha peternakan	10%	319,000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Peningkatan Bimbingan dan penyuluhan terhadap kelompok Peternak dan pelaku usaha peternakan	10%	319,000	
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Pelaksanaan Penyuluhan terhadap Peternak dan pelaku usaha peternakan	12 Bulan	319,000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Pelaksanaan Penyuluhan terhadap Peternak dan pelaku usaha peternakan	12 Bulan	319,000	
					60,430,000						60,430,000

Sumber: RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap SKPD diwajibkan menampung aspirasi masyarakat melalui mekanisme Forum SKPD.

Musrenbang dilaksanakan dari mulai dari Tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kabupaten/Kota. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan

Dalam Forum SKPD, setiap SKPD menampung usulan masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah tahapan pemantapan usulan program/kegiatan yang akan disampaikan pada forum SKPD. Pada tahap ini peranan SKPD sangat besar dalam membantu masyarakat memformulasikan usulan program/kegiatan mereka.

Forum SKPD adalah tahapan sinkronisasi usulan program/kegiatan SKPD dengan usulan masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan. Pada tahap ini usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD sesuai dengan renstra dan misi dalam RPJMD. Musrenbang Tingkat Kabupaten/Kota adalah puncak dari pelaksanaan Musrenbang, merupakan tahapan finalisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD terkait.

Selain dari usulan musrenbang usulan masyarakat juga melalui pokok-pokok pikiran DPRD dengan langkah-langkah yang perlu

dilakukan dalam rangka penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, antara lain sebagai berikut:

- Inventarisasi jenis program/ kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan Pokir DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan SKPD.
- Pengkajian pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/ kegiatan hasil penelaahan tersebut
- Verifikasi dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.
- Perumusan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Kabupaten, usulan pembangunan sektor Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Garut disajikan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023
Dinas Perikanan dan Peternakan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Persentase Produksi Perikanan Tangkap		
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Persentase peningkatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	1 usulan	

2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Pameungpeuk, Kab. Garut, Pameungpeuk, Jatimulya Kab. Garut, Cibalong Kab. Garut, Cibalong, Sancang Kab. Garut, Cikelet Kab. Garut, Bungbulang Kab. Garut, Mekarmukti Kab. Garut, Mekarmukti, Jayabaya Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana Kab. Garut, Pakenjeng Kab. Garut, Caringin Kab. Garut, Caringin, Indralayang Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Peningkatan kemampuan usaha nelayan dan masyarakat pesisir	7 Usulan	
II	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Persentase produksi perikanan budidaya		
1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Prosentase Peningkatan Kapasitas Produksi Hasil perikanan	41 Usulan	
III	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase peningkatan produksi hasil peternakan		
1	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Garut, Semua Kecamatan	peningkatan populasi ternak	150 Usulan	
IV	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Prasarana yang dibangun/ dikembangkan		
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Persentase Peningkatan prasarana pertanian	8 Usulan	

V	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase peningkatan layanan kesehatan hewan dan kesmavet		
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Leuwigoong dan Cibalong.	Persentase Peningkatan sarana Prasarana Pelayanan Keswan	2 Usulan	

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel diatas usulan kegiatan pembangunan di sektor perikanan berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (RPTK) adalah::

- (1) Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap diusulkan oleh 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Pameungpeuk, Bungbulang, Cibalong, Cikelet, Mekarmukti, dan Caringin
- (2) Pengembangan sarana prasarana perikanan Budidaya diusulkan oleh 42 Kecamatan.
- (3) Restocking pada Perairan Umum Daratan di usulkan oleh 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Cisewu

Usulan kegiatan pembangunan di sektor Peternakan berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (RPTK) adalah:

- (1) Pengembangan sarana usaha peternakan diusulkan oleh 7 kecamatan yaitu Kecamatan Bungbulang, Cibiuk, Cisurupan, Karangpawitan, Kadungora, Malangbong, Mekarmukti, Cilawu dan Singajaya
- (2) Pengembangan Ternak Sapi Perah diusulkan oleh 6 kecamatan yaitu Kecamatan Cilawu, Cikajang, Cigedug, Bayongbong, Banjarwangi, dan Cihurip
- (3) Pengembangan ternak Sapi Potong diusulkan oleh 23 kecamatan yaitu Kecamatan Malangbong, Cibalong, Singajaya, Cisompet, Cisewu, Cikelet, Kadungora, Karangpawitan, Kadungora, Karangtengah, Mekarmukti, Bl. Limbangan, Cikajang, Cigedug, ,Tarogong kaler, Pamulihan, Pakenjeng, Peundeuy, Pameungpeuk, Cibalong, Caringin, Bungbulang dan Pangatikan

- (4) Pengembangan ternak Domba Garut dan kambing diusulkan oleh seluruh kecamatan yaitu 42 Kecamatan
- (5) Pengembangan Ternak Unggas diusulkan oleh 7 kecamatan yaitu Kecamatan Cigedug, Bayongbong, Cibatu, Pasirwangi, Cihurip, Bl. Karangpawitan, Kadungora, Cisurupan, Tarogong Kaler, Pamulihan Limbangan dan Peundeuy
- (6) Pengembangan Pelayanan Medis Kesehatan Hewan diusulkan oleh 2 kecamatan yaitu Kecamatan Leuwigoong dan Cibalong.

Sehubungan dengan keterbatasan anggaran pemerintah daerah, usulan dari masing-masing Kecamatan tidak seluruhnya bisa ditampung dalam Rencana Kerja SKPD. Setiap usulan disaring kembali untuk diurutkan berdasarkan prioritas. Usulan dikelompokkan dalam prioritas-prioritas program/kegiatan dengan spesifikasi sebagai berikut :

- (1) Prioritas I adalah program/kegiatan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan (darurat) karena jika tidak segera dilaksanakan akan membawa dampak yang bersifat *multiplier* (mengakibatkan kerugian langsung yang lebih besar pada masyarakat) ataupun jika kegiatan tersebut mampu mengungkit / membangkitkan potensi-potensi masyarakat sehingga lebih meningkat kesejahteraannya..
- (2) Prioritas II adalah program/kegiatan yang bersifat rehabilitasi atau revitalisasi sehingga walaupun termasuk kegiatan penting akan tetapi tidak secara langsung membawa dampak pada masyarakat.
- (3) Prioritas III adalah program/kegiatan prioritas yang membawa dampak jangka panjang akan tetapi keberadaannya merupakan suatu keharusan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tidak seluruh kegiatan usulan masyarakat bisa diakomodasi. Hanya kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan prioritas yang diakomodasi. Pemilihan prioritas usulan masyarakat dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan kebijakan maupun teknis yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit kerja Dinas Perikanan dan Peternakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Visi Pembangunan Nasional: Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang harus didukung oleh industrialisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi.

Misi Presiden :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
 5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
- Arahan Presiden

1. Pembangunan Sumberdaya Manusia
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Agenda Prioritas Pembangunan :

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Pengembangan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.1.1 Kebijakan Nasional Sektor Perikanan dan Kelautan

Arah kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Pembangunan Nasional Kelautan tahun 2020-2024 adalah:

1. Peningkatan PNBP dari sumberdaya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan
4. Pengelolaan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait
5. Penguatan SDM dan kebijakan kelautan dan perikanan

3.1.2 Kebijakan Nasional Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kondisi umum pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang dilakukan melalui berbagai kebijakan dan standarisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan pada aspek ekonomi, aspek teknis, dan aspek fungsional. Telaah rencana strategis pembangunan sektor peternakan terutama diarahkan pada rencana strategis Kementerian Pertanian melalui Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kewenangan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian R.I diantaranya mengatur beberapa kebijakan dan regulasi untuk mewadahi aspirasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan hewani asal ternak, dan kebutuhan

untuk industri. Memasuki periode pembangunan jangka menengah 20, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian R.I menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024; dan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam periode tahun 2020-2024 adalah merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berbasis sumber daya lokal yaitu dalam rangka : 1) meningkatkan produksi ternak, (2) Meningkatkan kualitas komoditas ternak, (3) Meningkatkan produk ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor, (4) meningkatkan status kesehatan hewan, 5) Meningkatkan investasi peternakan, dan 6) meningkatkan kesejahteraan peternak

Tujuan yang tercantum dalam Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024 tersebut diatas menunjukkan bahwa peranan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah untuk mendongkrak pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang ada di masyarakat .Oleh karena itu Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan salah satu aktor penting dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selain aktor-aktor lainnya yaitu para peternak dan kelompok peternak, pengusaha swasta, akademisi, dan perbankan. Dengan berbagai kendala yang ada, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian R.I dalam menjalankan perannya telah mendorong dan melakukan upaya koordinasi yang melibatkan seluruh pelaku guna meningkatkan pembangunan daerah salah satunya dalam produksi peternakan.

Selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian R.I tersebut, pembangunan peternakan di Jawa Barat pun tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di Pusat, wilayah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian R.I menetapkan arah kebijakan dan strateginya dengan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Arah program mengarah pada 2 (dua) kata kunci dalam program tersebut, yaitu: kata kunci pertama, pemenuhan pangan asal ternak yang mengarah pada pencapaian peningkatan populasi dan produksi ternak (daging, telur dan susu). Kata kunci kedua adalah agribisnis peternakan rakyat yang mengarah pada peningkatan daya saing peternakan dan kesehatan hewan. Sasaran strategi yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu :

1. Peningkatan produksi daging
 - a. Produksi daging sapi kerbau
2. Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing
 - a. Produksi daging ternak lainnya
 - b. Produksi telur
 - c. Produksi susu
 - d. Ternak bersertifikat/SKLB
 - e. Persyaratan mutu dan keamanan produk hewan
 - f. Volume ekspor komoditi peternakan
 - g. Status kesehatan hewan
 - h. Investasi sub sektor peternakan
3. Peningkatan kesejahteraan keluarga peternak
 - a. PDB peternakan terhadap jumlah tenaga kerja peternakan
 - b. Nilai tukar peternak.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Untuk itu perlu ada upaya penjabaran dari tujuan dan sasaran RENSTRA yang telah ditetapkan kedalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Renja. Oleh karena itu, dalam dokumen RENJA perlu ditetapkan tujuan, sasaran dan program kegiatan terpilih dalam rangka mensinergikan antara capaian kinerja yang ditetapkan dalam RENSTRA kedalam program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.

3.2.1 Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut terutama Misi Ke 4 yaitu Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan”, dan dengan memperhatikan isu strategis pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD. Tujuan pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan ditetapkan sebagai berikut yaitu: “Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan dan peternakan melalui pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal secara berkelanjutan”.

3.2.2 Sasaran

Mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut periode 2019-2024 serta visi, misi dan tujuan, Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan dua sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan melalui pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan, dan
2. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan berbasis potensi lokal.

Indikator tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran		Satuan
1	2	3		4		5
Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan dan peternakan melalui pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal secara berkelanjutan	Produksi dan nilai tambah hasil perikanan dan peternakan	1	Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan melalui pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan	A	Produksi Perikanan Budidaya	Ton
				B	Produksi Perikanan Tangkap	Ton
				C	Produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan	Ton
		2	Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan berbasis potensi lokal	A	Produksi Hasil Peternakan	Ton
				B	Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan	%
				C	Produksi dan pemasaran produk olahan hasil peternakan	Ton

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024

3.3 Program dan Kegiatan

Program / kegiatan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut mencakup *Sasaran, Program dan Kegiatan* yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan adalah dalam rangka mendukung visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut periode 2019 – 2024 yaitu *"Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera"* dan Misi ke 4 yaitu *"Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan"* serta disesuaikan dengan tema RKPD Tahun 2023 yaitu Penguatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Rencana program indikatif dimaksudkan sebagai pedoman bagi aktifitas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan selama lima tahun ke depan. Program diuraikan berdasarkan target pencapaian misi organisasi serta mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019, sedangkan sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Rencana Program dan Kegiatan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Dinas Perikanan dan Peternakan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan dan Peternakan pada tahun 2023 direncanakan akan melaksanakan 10 program yang terdiri dari 1 (satu) program kesekretariatan, 4 (empat) program urusan bidang kelautan dan perikanan dan 5 (lima) program urusan bidang pertanian (peternakan) dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2023
Dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			29,734,000,000				32,545,700,000	
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pemenuhan kinerja pelayanan SKPD		100 %	15,422,000,000			16,961,500,000	
3	25	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Dokumen perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan		100 %	288,000,000			316,800,000	

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	53,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	58,300,000
3	25	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	44,000,000
3	25	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	33,000,000
3	25	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	33,000,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	25	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	22,000,000
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Laporan	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	44,000,000
3	25	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	82,500,000
3	25	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi keuangan Perangkat daerah		100 %	11,930,000,000			13,123,000,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Orang /bulan	11,880,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	13,068,000,000
3	25	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	55,000,000
3	25	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	170,000,000				187,000,000
3	25	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	82,500,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	25	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	66,000,000
3	25	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	38,500,000
3	25	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah		100 %	646,000,000				710,600,000
3	25	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	16,500,000
3	25	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		100 %	176,000,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

										Umum			
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	33,000,000
3	25	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	33,000,000
3	25	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	115,500,000
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	216,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	237,600,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	25	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	55,000,000
3	25	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	44,000,000
3	25	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik		100 %	1,211,000,000			1,332,100,000
3	25	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	261,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	287,100,000
3	25	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	275,000,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	25	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	385,000,000
3	25	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	385,000,000
3	25	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan administrasi penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	582,000,000			637,500,000
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	132,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	142,500,000
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	495,000,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	25	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur kondisi baik		100 %	595,000,000				654,500,000
3	25	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Unit	145,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	159,500,000
3	25	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	495,000,000
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Tangkap		0.50 %	4,850,000,000				5,323,000,000
3	25	3	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Persentase peningkatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,		10 %	2,620,000,000				2,870,000,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

					Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota							
3	25	3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.50 %	110,000,000
3	25	3	2.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Kab. Garut, Pameungpeuk, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cikelet, Semua Kelurahan	5 Unit	1,200,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		0.50 %	1,320,000,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

							Kab. Garut, Bungbulang , Semua Kelurahan						
							Kab. Garut, Mekarmukti , Semua Kelurahan						
							Kab. Garut, Pakenjeng, Semua Kelurahan						
							Kab. Garut, Caringin, Semua Kelurahan						
3	25	3	2.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kab. Garut, Karangpawitan, Semua Kelurahan	10 Unit	1,320,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0.50 %	1,440,000,000
							Kab. Garut, Wanaraja, Semua Kelurahan						

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

							Kab. Garut, Cisewu, Pamalayan						
							Kab. Garut, Cibiuk, Semua Kelurahan						
3	25	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kemampuan usaha nelayan dan masyarakat pesisir		10 %	1,530,000,000				1,683,000,000
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Garut, Pameungpe uk, Semua Kelurahan Kab. Garut, Pameungpe uk, Jatimulya Kab. Garut, Cibalong, Semua Kelurahan	300 Orang	800,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0,5 %	880,000,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

							Kab. Garut, Caringin, Semua Kelurahan						
							Kab. Garut, Caringin, Indralayang						
							Kab. Garut, Caringin, Purbayani						
3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kelompok	400,000,000			0,5 %	440,000,000
							Kab. Garut, Pameungpeuk, Semua Kelurahan						
							Kab. Garut, Cibalong, Semua Kelurahan						
							Kab. Garut, Cikelet, Semua Kelurahan						

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

							Kab. Garut, Bungbulang , Semua Kelurahan						
							Kab. Garut, Mekarmukti , Semua Kelurahan						
							Kab. Garut, Pakenjeng, Semua Kelurahan						
							Kab. Garut, Caringin, Semua Kelurahan						
3	25	3	2.02	3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Garut, Pameungpe uk, Semua Kelurahan	5 Unit Usaha	330,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0,5 %	363,000,000
							Kab. Garut, Cibalong, Semua Kelurahan						

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

						Kab. Garut, Cikelet, Semua Kelurahan						
						Kab. Garut, Bungbulang , Semua Kelurahan						
						Kab. Garut, Mekarmukti , Semua Kelurahan						
						Kab. Garut, Pakenjeng, Semua Kelurahan						
						Kab. Garut, Caringin, Semua Kelurahan						
3	25	3	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	10 %	700,000,000				770,000,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	25	3	2.03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Garut, Pameungpeuk, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garut, Mekarmukti, Semua Kelurahan Kab. Garut, Pakenjeng, Semua Kelurahan Kab. Garut, Caringin, Semua Kelurahan	5 Layanan	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0,5 %	770,000,000
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN	Persentase produksi perikanan budidaya		1 %	7,711,000,000				8,335,100,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

					BUDIDAYA									
3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Prosentase Peningkatan Kapasitas Produksi Hasil perikanan		10 %	2,461,000,000					2,707,100,000
3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Kelurahan Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan Kab. Garut, Tarogong Kidul, Pataruman	37 Kelompok	2,161,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 %	2,377,100,000	

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

							Kab. Garut, Pangatikan, Semua Kelurahan						
							Kab. Garut, Pangatikan, Sukamulya Kab. Garut, Sucinaraja, Semua Kelurahan						
3	25	4	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kelomp ok	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 %	110,000,000
3	25	4	2.02	3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahnya		5 Kelompo k	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 %	110,000,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Kelompok	100,000,000			1 %	110,000,000
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Peningkatan dan Penjaminan ketersediaan sarana prasarana budidaya perikanan serta promosi hasil perikanan		10 %	5,250,000,000				5,628,000,000
3	25	4	2.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 %	121,000,000
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	2,155,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 %	2,370,500,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

							Kab. Garut, Garut Kota, Semua Kelurahan			Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			
							Kab. Garut, Bayongbong , Semua Kelurahan						
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Garut Kota, Semua Kelurahan Kab. Garut, Tarogong Kaler, Jati Kab. Garut, Bayongbong , Semua Kelurahan	15 Unit	2,770,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 %	2,900,000,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	215,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 %	236,500,000
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Lokasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan		6 kecamatan	400,000,000				440,000,000
3	25	5	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengawaan sumberdaya perikanan		10 %	400,000,000				440,000,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Banyuwesmi, Semua Kelurahan Kab. Garut, Pameungpeuk, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cikelet, Semua Kelurahan Kab. Garut, Mekarmukti, Semua Kelurahan	1 Dokumen	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 kecamatan	440,000,000
---	----	---	------	---	---	--	---	-----------	-------------	--------------------------------------	-------------	-------------

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

						Kab. Garut, Pakenjeng, Semua Kelurahan						
						Kab. Garut, Caringin, Semua Kelurahan						
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan		3 %	1,351,000,000			1,486,100,000
3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pembinaan mutu dan keamanan pangan		10 %	375,000,000			412,500,000
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Usaha	375,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3 %	412,500,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

						Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko							
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Peningkatan ketersediaan dan penyaluran bahan baku pengolahan ikan	3 %	976,000,000				1,073,600,000
3	25	6	2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	5 Ton	576,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 %	633,600,000
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Pelaku Usaha	400,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 %	440,000,000
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				30,696,000,000				33,765,600,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan			21,932,000,000				24,125,200,000
3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan sumberdaya generik hewan			1,540,000,000				1,694,000,000
3	27	2	2.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cibalong, Semua Kelurahan	2 VUB	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 %	275,000,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 %	770,000,000
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	1 Dokumen	590,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 %	649,000,000
3	27	2	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Pengendalian dan Pendistribusian Bibit ternak dan HPT	10 %		1,262,000,000			1,388,200,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	27	2	2.05	1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Tarogong Kidul, Mekargalih Kab. Garut, Banyuresmi , Banyuresmi Kab. Garut, Leles, Ciburial Kab. Garut, Malangbong , Sekarwangi	100 Ekor	820,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 %	902,000,000
---	----	---	------	---	---	--	---	----------	-------------	--------------------------------------	--	-----	-------------

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

							Kab. Garut, Bayongbong , Semua Kelurahan Kab. Garut, Cigedug, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cilawu, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cisurupan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan Kab. Garut, Banjarwang i, Banjarwang i					
3	27	2	2.05	5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Ton	442,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3 %	486,200,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

							Kab. Garut, Pasirwangi, Semua Kelurahan Kab. Garut, Kadungora, Gandameka r Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan						
3	27	2	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	peningkatan populasi ternak		0.5 %	19,130,000,000				21,043,000,000
3	27	2	2.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Garut Kota, Margawati	2514 Ekor	18,080,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 %	19,888,000,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

						Kab. Garut, Cibiuk, Lingkunpa sir					
						Kab. Garut, Pangatikan, Babakan Loa					
						Kab. Garut, Pangatikan, Sukahurip					
						Kab. Garut, Sucinaraja, Tegalpanjan g					
						Kab. Garut, Sucinaraja, Linggamukt i					
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	10 %			6,765,000,000		7,441,500,000
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana	Prasarana yang dibangun/			3,565,000,000		3,921,500,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

					Pertanian	dikembangkan							
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug Kab. Garut, Cigedug, Barusuda Kab. Garut, Cigedug, Sukahurip Kab. Garut, Cigedug, Sindangsari Kab. Garut, Cigedug, Cintanagara Kab. Garut, Sukaresmi, Sukamulya	7 Unit	665,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 %	731,500,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

							Kab. Garut, Peundeuy, Purwajaya						
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Garut, Karangpawitan, Situsaeur Kab. Garut, Kadungora, Tanggulun Kab. Garut, Sukaresmi, Sukajaya Kab. Garut, Sukaresmi, Padamukti Kab. Garut, Cibiuk, Lingkungsir	5 Unit	600,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 %	660,000,000
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Garut, Banjarwangi, Padahurip	7 Unit	700,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 %	770,000,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

							Kab. Garut, Banjarwang i, Mulyajaya						
							Kab. Garut, Banjarwang i, Tanjungjaya						
							Kab. Garut, Cisompet, Panyindang an						
							Kab. Garut, Cisompet, Neglasari						
							Kab. Garut, Mekarmukti , Jayabaya						
3	27	3	2.02	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Kelurahan	3 Unit	800,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 %	880,000,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

							Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan						
							Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semua Kelurahan						
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Garut, Bayongbong , Semua Kelurahan	3 Unit	800,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 %	880,000,000
							Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan						

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

							Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semua Kelurahan					
3	27	3	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Sentra Pembibitan Ternak (Kawasan)		1 kawasan n	3,200,000,000			3,520,000,000
3	27	3	2.03	1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Kab. Garut, Sukawening , Mekarluayu	1 Laporan	3,200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	3,520,000,000
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan layanan kesehatan hewan dan kesmavet		5 %	1,630,000,000			1,793,000,000
3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit	Prosentase Peningkatan Pelayanan kesehatan hewan melalui vaksinasi		5 %	300,000,000			330,000,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

					Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	dan pengobatan penyakit ternak							
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 %	165,000,000
3	27	4	2.01	3	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	1,200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 %	1,320,000,000
3	27	4	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Pengawasan Hewan dan Produk Asal hewan (PAH) dalam satu tahun		5 %	250,000,000				275,000,000
3	27	4	2.02	1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 %	165,000,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	27	4	2.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 %	55,000,000
3	27	4	2.02	3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 %	55,000,000
3	27	4	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan sarana Prasarana Pelayanan Keswan		5 %	830,000,000			913,000,000
3	27	4	2.03	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	230,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 %	253,000,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan	12 Laporan	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 %	660,000,000
3	27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner		5 %	250,000,000				275,000,000
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 %	110,000,000
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 %	165,000,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan pelayanan rekomendasi perizinan usaha peternakan		5 %	50,000,000				55,000,000
3	27	6	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin usaha Peternakan dan kesehatan hewan		12 Laporan	50,000,000				55,000,000
3	27	6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 %	11,000,000
3	27	6	2.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 %	44,000,000
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			10 %	319,000,000				350,900,000
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			12 Bulan	319,000,000				350,900,000

Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023

3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	110,000,000
3	27	7	2.01	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	165,000,000
3	27	7	2.01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	69,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	75,900,000
TOTAL									60,430,000,000			66,311,300,000

Sumber : Pengelolaan SIPD Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan indikatif dimaksudkan sebagai pedoman bagi aktifitas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan selama satu tahun ke depan. Program diuraikan berdasarkan target pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dengan sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra SKPD. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Rencana program indikatif dimaksudkan sebagai pedoman bagi aktifitas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan selama satu tahun ke depan. Program diuraikan berdasarkan target pencapaian sasaran SKPD serta mengacu pada penetapan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan Permendagri Nomor. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Untuk sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas sebagaimana tercantum dalam Renstra.

4.1 Target Kinerja Sasaran

Mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024 dan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Perikanan dan Peternakan pada Tahun 2023 menetapkan dua sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan melalui pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan;

2. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan berbasis potensi lokal.

Selanjutnya, sesuai dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024, pada Tahun 2022 ditetapkan target capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Indikator dan Target Sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023

SASARAN			
URAIAN	INDIKATOR		TARGET
1	2		3
1. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan melalui pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan	1	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	65,662.00
	2	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1,468
	3	Produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan (Ton)	765
2. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan berbasis potensi lokal	1	Produksi Hasil Peternakan (ton)	38,467
	2	Produksi dan pemasaran produk olahan hasil peternakan (ton)	898
	3	Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan (%)	5

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024

4.2 Rencana Program Kegiatan

Program / kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut mencakup *Sasaran, Program dan Kegiatan* yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan program dan kegiatan prioritas. Dasar pertimbangan penetapan program dan

kegiatan proiritas atau unggulan adalah dalam rangka melakukan mencapai target kinerja produksi perikanan dan peternakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024.

Rencana program indikatif dimaksudkan sebagai pedoman bagi aktifitas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan selama lima tahun ke depan. Program diuraikan berdasarkan target pencapaian sasaran organisasi serta mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019, sedangkan sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan dan Peternakan pada tahun 2023 direncanakan akan melaksanakan 10 program yang terdiri dari 1 (satu) program kesekretariatan, 4 (empat) program urusan kelautan dan perikanan dan 5 (lima) program urusan pertanian (peternakan) dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - h. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - c. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
1. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
2. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - a. Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil;
 - a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
 - d. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

IV. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

V. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
2. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

VI. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota;
 - a. Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - c. Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
2. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
 - b. Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
3. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

VII. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian;
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
 - c. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - d. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
 - e. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
2. Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

VIII. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 - b. Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
 - c. Sub Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
4. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Sub Kegiatan Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

IX. Program Perizinan Usaha Pertanian

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten / Kota;
 - a. Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
 - b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

X. Program Penyuluhan Pertanian

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - b. Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
 - c. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota

4.3 Gerakan Besar dan Kegiatan Unggulan

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan, pada Tahun 2023 Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan kegiatan unggulan yaitu:

1. Pengembangan Kawasan Perbibitan Domba Garut di Desa Sukaluyu Kecamatan Sukawening;
2. Pengelolaan Perairan Umum Daratan (PUD) dan restocking PUD
3. Optimalisasi Pusat Kesehatan Hewan
4. Pengembangan Sentra Produksi Perikanan /Kampung Perikanan Budidaya;
5. Peningkatan layanan Kesehatan hewan dan peningkatan surveillance penyakit hewan
6. Pembangunan pasar ikan modern di Kec. Tarogong Kaler;
7. Rehabilitasi Rumah Potong Hewan;
8. Peningkatan sarana dan Prasarana pembibitan ternak;
9. Optimalisasi pengelolaan pakan ternak
10. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
11. Peningkatan layanan public sektor perikanan dan peternakan
12. Optimalisasi bantuan kepada kelompok peternakan dan perikanan

Selain menetapkan dua belas kegiatan unggulan, Dinas Perikanan dan Peternakan juga mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat inovasi diantaranya yang sudah berjalan adalah kegiatan inovasi Posyandu Ternak Keliling. Dalam periode Tahun 2019-2024, Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan satu kegiatan inovasi untuk setiap bidang yaitu inovasi Bidang Perikanan Tangkap, inovasi

bidang Perikanan Budidaya, inovasi bidang Peternakan dan inovasi bidang Kesehatan Hewan & Kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku Dinas Perikanan dan peternakan menetapkan kegiatan pendukung yaitu Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular

Dalam rangka gerakan penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID 19, Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan tiga program pendukung bagi upaya penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID 19 yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Penyuluhan Pertanian. Ketiga program tersebut akan dikhususkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan bantuan usaha.

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Mengingat tantangan pembangunan yang semakin besar di masa depan, diperlukan adanya upaya perencanaan secara sistematis dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara lebih efisien dan efektif sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai. Oleh karenanya perlu ada dokumen Rencana Kerja (RENJA) sebagai bentuk implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan ini dibutuhkan untuk perencanaan 1 (satu) tahun kedepan, catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan, maka Dinas Perikanan dan Peternakan akan mengambil kegiatan yang sangat prioritas dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan yang menunjang langsung pada peningkatan perekonomian peternak, pembudidaya ikan dan Nelayan dengan memperhatikan kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan acuan SKPD dalam mengimplementasikan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan selanjutnya, seluruh jajaran dalam organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut hendaknya mampu menerapkan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan setiap kegiatannya, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka pelaksanaan anggaran (*budget invention*).

5.3. Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana Kerja Tahun 2023 juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan SKPD.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN